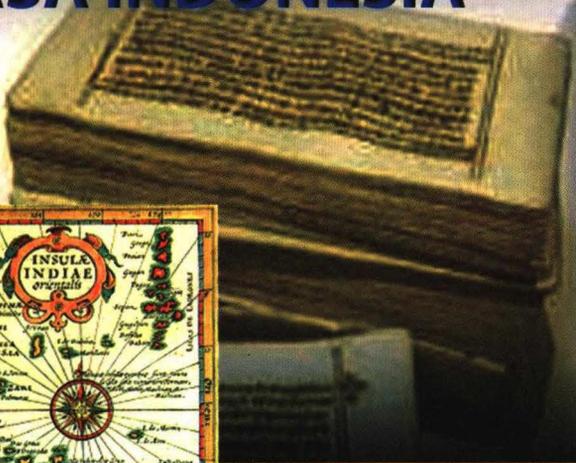
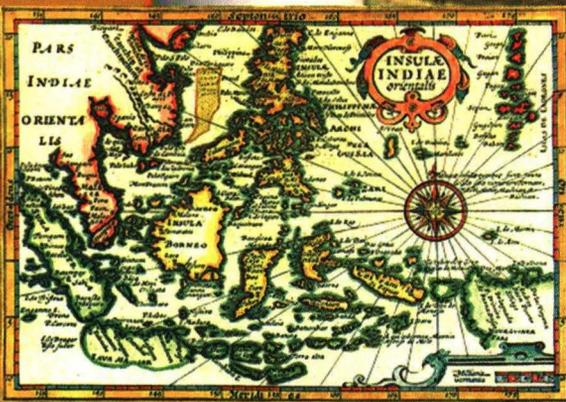




# PERANAN BAHASA DAERAH DALAM PEMERKAYAAN KOSA KATA BAHASA INDONESIA



KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
DEPUTI BIDANG NILAI BUDAYA, SENI & FILM



**PENYUSUNAN  
TENTANG PERANAN BAHASA  
DAERAH DALAM PEMERKAYAAN  
KOSAKATA BAHASA INDONESIA**



**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
DEPUTI BIDANG NILAI BUDAYA, SENI, DAN FILM**

**PENYUSUNAN  
TENTANG PERANAN BAHASA DAERAH  
DALAM PEMERKAYAAN  
KOSAKATA BAHASA INDONESIA**

**Nara Sumber/Pakar :**

**DR. Sri Hastanto, S. Kar**  
**DR. Ayat Rohaedi**  
**Drs. Abdul Rozak Zaidan, M. Sc**  
**Prof. Dr. I Dewa Putu Wijana**  
**Drs. Sutiman, M. Hum**

**Asisten Deputi Urusan Peningkatan Apresiasi Seni  
Deputi Bidang Nilai Budaya, Seni, dan Film  
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata  
Tahun 2003**

## KATA PENGANTAR

Untuk memperoleh masukan dalam penyusunan naskah kebijakan awal tentang Peranan Bahasa Daerah Dalam Pemerdayaan Kosa Kata Bahasa Indonesia, Asisten Deputi Peningkatan Apresiasi Seni yang bekerjasama dengan instansi-instansi terkait seperti Pusat Bahasa, Perguruan Tinggi, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, Budayawan telah mengadakan kegiatan dialog pakar yang dilaksanakan pada tanggal 15 -19 Juli 2003.

Penyusunan naskah kebijakan ini mengacu selain dari makalah-makalah dan hasil dialog pakar bahasa dan budaya yang pesertanya berasal dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo dan Semarang, juga dari keadaan yang terjadi sekarang ini yang berkaitan dengan Peranan Bahasa Daerah.

Adapun tujuan penyelenggaraan dialog pakar ini adalah berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan serta melestarikan apresiasi budaya daerah guna memperkaya kosa kata bahasa Indonesia. Juga dalam usaha menyelamatkan kehidupan bahasa daerah dan memperoleh masukan lebih mendalam tentang hubungan bahasa dan budaya.

Kami berharap kiranya naskah kebijakan awal tentang Peranan Bahasa Daerah Dalam Pemerdayaan Kosa Kata Bahasa Indonesia dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peranan bahasa daerah.

Jakarta,  
Penyusun

## DAFTAR ISI

KERANGKA KEBIJAKAN TENTANG PERAN BAHASA DAERAH DALAM PEMERKAYAAN KOSAKATA BAHASA INDONESIA .....	iv
<b>BAB I PERANAN BAHASA DAERAH DALAM PEMERKAYAAN BAHASA INDONESIA .....</b>	<b>1</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Situasi Kebahasaan Masyarakat Indonesia .....	1
1.2 Bahasa Daerah sebagai Lubuk Budaya Masyarakat Pendukungnya .....	3
1.3 Bahasa Daerah sebagai Sarana Penanaman Nilai Kesopanan .....	4
1.4 Bahasa Daerah sebagai Pendukung Perkembangan Bahasa Indonesia .....	5
1.5 Bahasa Daerah sebagai Kekayaan Budaya Bangsa .....	6
<b>BAB II BAHASA DAERAH SEBAGAI SUMBER PEMERKAYAAN KOSAKATA BAHASA INDONESIA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Bahasa Daerah sebagai Sumber Pemerdayaan Istilah .....	8
2.2 Kriteria Pemerdayaan Bahasa Indonesia dengan Kosakata Bahasa Daerah .....	9
2.2.1 Kata yang belum Ada di KBBI .....	9
2.2.2 Kata yang Berkonotasi Positif .....	9
a. Kata kerja yang mencerminkan etos kerja tinggi .....	9
b. Kata benda yang merupakan kekayaan produk budaya daerah ...	10
c. Kata yang tidak menimbulkan benturan budaya .....	10
2.2.3 Kata yang Kadar keberterimaannya Tinggi .....	10

2.2.4	Kata Yang Pernah muncul di dalam Media Massa.....	11
2.2.5	Kata Budaya yang Tidak Ada Padanannya dalam Bahasa Indonesia .	11
2.2.6	Kata Bahasa Daerah sehari-hari .....	11
2.2.7	Kata yang Termuat dalam Puisi atau Cerita .....	12
BAB III	MEDIA PEMASUKAN KOSAKATA BAHASA DAERAH KE DALAM KOSA KATA BAHASA INDONESIA .....	12
3.1	Keluarga .....	12
3.2	Sekolah/Perguruan Tinggi .....	13
3.3	Lingkungan Pergaulan .....	14
3.4	Media Massa.....	14
	a. Media Massa Cetak .....	15
	b. Media Massa Elektronik .....	16
3.5	Karya Sastra.....	16
BAB IV	KEGIATAN DAN PELAKU.....	17
4.1	Kegiatan .....	18
	a. Seminar dan Penelitian .....	18
	b. Penerjemahan .....	18
	c. Penyusunan .....	19
	d. Penerbitan.....	19
	e. Lomba .....	20
	f. Pemberian Penghargaan .....	20
	g. Pementasan.....	20
4.2	Pelaku .....	20
	a. Instansi Pemerintah .....	20
	b. Organisasi.....	21
	c. Seniman (pendongeng, dalang, penulis) ..	21
	d. Guru/Dosen .....	22
	e. Peneliti .....	22
	f. Penerjemah.....	22
	g. Tokoh .....	22
BAB V	PENUTUP .....	24
LAMPIRAN		

**KERANGKA KEBIJAKAN  
TENTANG  
PERAN BAHASA DAERAH DALAM  
PEMERKAYAAN KOSAKATA BAHASA INDONESIA**

- I. SITUASI KEBAHASAAN MASYARAKAT INDONESIA
  - 1.1 Bahasa Daerah dalam Konteks Politik Bahasa di Indonesia.
  - 1.2 Bahasa Daerah sebagai Lubuk Budaya Masyarakat Pendukungnya.
  - 1.3 Bahasa Daerah sebagai Sarana Penanaman Nilai Kesopanan.
  - 1.4 Bahasa Daerah sebagai Pendukung Perkembangan Bahasa Indonesia.
  - 1.5 Bahasa Daerah sebagai Kekayaan Budaya Bangsa.
  
- II. BAHASA DAERAH SEBAGAI SUMBER PEMERKAYAAN KOSAKATA BAHASA INDONESIA
  - 2.1 BD sebagai Sumber Pemerdayaan Istilah
  - 2.2 Kriteria Pemerdayaan BI dengan Kosakata BD
    - 2.2.1 Kata yang belum Ada di KBBI
    - 2.2.2 Kata yang Berkonotasi Positif
      - a. Kata kerja yang mencerminkan etos kerja tinggi
      - b. Kata benda yang merupakan kekayaan produk budaya daerah
      - c. Kata yang tidak menimbulkan benturan budaya
    - 2.2.3 Kata yang kadar keberterimaannya Tinggi
    - 2.2.4 Kata yang Pernah muncul di dalam Media Massa
    - 2.2.5 Kata Budaya yang Tidak Ada Padanannya dalam Bahasa Indonesia.
    - 2.2.6 Kata Bahasa Daerah sehari-hari
    - 2.2.7 Kata yang Termuat dalam Puisi atau Cerita

### III. MEDIA PEMASUKAN KOSAKATA DAERAH KE DALAM BAHASA INDONESIA

- 1.3.1 Keluarga
- 1.3.2 Sekolah/Perguruan Tinggi
- 1.3.3 Lingkungan Pergaulan
- 1.3.4 Media Massa
  - a. Media Massa Cetak
  - b. Elektronik
- 1.3.5 Karya Sastra

### IV. Kegiatan dan Pelaku

- 4.1 Kegiatan
  - a. Seminar dan Penelitian
  - b. Penerjemahan
  - c. Penyusunan
  - d. Penerbitan
  - e. Lomba
  - f. Pemberian Penghargaan
  - g. Pementasan
- 4.2 Pelaku
  - a. Instansi-Pemerintah
  - b. Organisasi
  - c. Seniman (pendongeng, dalang, penulis)
  - d. Guru/Dosen
  - e. Peneliti
  - f. Penerjemah
  - g. Tokoh

### V. PENUTUP

# **BAB I**

## **PERAN BAHASA DAERAH DALAM PEMERKAYAAN BAHASA INDONESIA**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **1.1 Situasi Kebahasaan Masyarakat Indonesia**

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang multibahasa yang didalam kehidupannya menghadapi pemakaian bahasa lebih dari satu bahasa. Paling sedikit seorang Indonesia akan menghadapi bahasa Ibu (bahasa daerah) dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pada perkembangan lebih lanjut, untuk keperluan komunikasi yang lebih luas terutama dalam rangka peningkatan pendidikan, bahasa asing menambah jumlah bahasa yang harus dikuasai. Dapat dikatakan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat makin tinggi pula tuntutan untuk menguasai lebih dari satu bahasa.

Dalam lingkungan pergaulan yang terbatas di daerah, bahasa daerah mengambil peran yang besar untuk keperluan komunikasi antar sesama warga daerah dalam kehidupan sehari-hari di pedesaan. Namun, ketika masyarakat berhubungan dengan pemerintahan desa, peran bahasa daerah sedikit "terdesak" oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, apalagi kalau penyelenggaraan pemerintahan di desa berasal dari warga kelompok etnik yang berbeda. Demikian juga ketika masyarakat harus berhubungan dengan dunia pendidikan formal, peran bahasa daerah itu pun ikut menyusut.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang antara lain, menghasilkan media massa elektronik, penggunaan bahasa daerah juga mengalami penurunan peran. Melalui alat teknologi itu pula, bahkan bahasa asing mulai masuk dalam perbendaharaan bahasa mereka meskipun baru dalam tataran yang amat rendah. Bahasa Indonesia makin merasuk dalam dunia pemikiran sehari-hari orang pedesaan, juga melalui media massa elektronik. Situasi kebahasaan seperti ini menempatkan bahasa

daerah pada posisi yang marginal, yang menjadikan bahasa daerah menghadapi ancaman kepunahan terutama bahasa daerah dengan jumlah penutur di bawah satu juta. Selain itu, penutur bahasa daerah yang bermigrasi ke kota-kota cenderung untuk melupakan bahasa daerahnya karena keperluan alat komunikasi lintas etnik.

Situasi kebahasaan masyarakat seperti itu menuntut adanya kebijakan bahasa yang dapat memberikan perlindungan akan hak hidup budaya daerah, khususnya bahasa daerah. Untuk itu, dalam Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1975 yang ditegaskan kembali dalam seminar Politik Bahasa tahun 1999 bahwa politik bahasa nasional merupakan kebijakan nasional yang berisi pengarahannya perencanaan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar pengelolaan keseluruhan masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Ditegaskan pula bahwa keseluruhan masalah itu merupakan jaringan masalah yang menyangkut bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra daerah, serta masalah bahasa asing di Indonesia atau dalam konteks keindonesiaan. Khusus yang menyangkut bahasa daerah ditegaskan bahwa fungsi bahasa daerah sebagai sarana perhubungan intradaerah atau intra masyarakat dan sarana pendukung sastra dan budaya daerah atau masyarakat etnik di wilayah Republik Indonesia. Bahasa dan sastra daerah yang dipelihara oleh masyarakat pendukungnya diakui sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup.

Dalam konteks Politik Bahasa Nasional, bahasa daerah berfungsi sebagai lambang kebanggaan daerah, alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, sarana pendukung budaya daerah- dan bahasa Indonesia, serta pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia. Sastra daerah itu sendiri merupakan bukti historis kreativitas masyarakat daerah dan mempunyai kedudukan sebagai wahana ekspresi budaya yang merekam pengalaman estetis, religius, atau sosial politik masyarakat etnik yang bersangkutan.

## **1.2 Bahasa Daerah sebagai Lubuk Budaya Masyarakat Pendukungnya**

Bahasa dan sastra daerah menempati kedudukan yang unik dalam budaya, yaitu dari satu pihak sebagai unsur budaya dan di pihak lain sebagai penampung atau lubuk kekayaan unsur budaya lainnya. Dapat dikatakan bahwa kekayaan sistem kepercayaan/keagamaan, kelembagaan/ kemasyarakatan, perekonomian, teknologi, pengetahuan, dan kesenian suatu masyarakat sebagian besar diselamatkan dan diwariskan kepada generasi selanjutnya melalui bahasa dan sastra. Hal itu dimungkinkan karena bahasa dan sastra merupakan pencatat dan atau perekam segala yang ada dan pernah terjadi dalam masyarakat serta terwujud dalam unsur budaya lainnya itu.

Bahasa daerah itu sendiri di luar sastra telah mengandung berbagai dimensi fungsi diluar fungsi komunikasi. Dalam bahasa daerah itu sendiri dalam sistemnya tersirat sikap dan karakter masyarakat pendukung bahasa daerah itu. Bahasa daerah yang mengenal sistem tingkat tutur atau udak-usuk bahasa dalam sistem komunikasi di antara sesamanya, misalnya tersirat tata kesopanan yang kadang-kadang secara garis besar dipandang sebagai cerminan dari sikap tidak demokratis. Selain itu, hubungan yang penuh adab antara anggota keluarga tercermin juga dalam tata komunikasi yang dinyatakan dalam perbedaan pemakaian kata karena perbedaan status keluarga atau status anggota keluarga itu. Tata komunikasi antara anak dan orang tua serta antara anak dan sesamanya dinyatakan dalam kata/bahasa yang berbeda untuk menunjukkan nilai kesopanan, sebagaimana dikenal dalam bahasa Jawa dan Sunda, misalnya.

Bahasa daerah yang menghasilkan sastra dari yang amat sederhana sampai dengan yang paling rumit mengandung pula kearifan lokal. Yang sederhana, misalnya terungkap dalam peribahasa sehingga untuk menemukannya tidak memerlukan kajian Yang mendalam, sedangkan kearifan lokal Yang sedikit - rumit, misalnya dapat dikaji dari mite, legende, dan cerita rakyat

lainnya yang untuk merumuskannya diperlukan kajian hermeneutik dan semiotik. Melalui kajian ini, antara lain dapat diungkapkan ihwal mitologi daerah yang pengembangannya lebih lanjut dapat diangkat menjadi mitologi Indonesia.

Sebagai lubuk budaya daerah masyarakat pendukungnya, bahasa daerah dan sastra daerah dapat menjadi sumber informasi dan sumber acuan untuk keperluan merumuskan nilai-nilai budaya daerah. Nilai-nilai budaya daerah itu pada gilirannya akan menjadi kekayaan budaya nasional yang amat terkait dengan kehidupan batin pendukung budaya daerah yang bersangkutan. Konsep gotong royong yang dianggap sebagai nilai budaya Timur dalam perwujudannya untuk setiap kelompok etnik memperoleh ungkapan yang berbeda-beda meskipun kandungan maknanya sama.

### **1.3 Bahasa Daerah sebagai Sarana Penanaman Nilai Kesopanan**

Nilai kesopanan yang mengatur tata hubungan antar pribadi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat termuat juga dalam bahasa daerah. Bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali mengenal kosakata yang pemanfaatannya tidak semata-mata terkait dengan keperluan komunikasi rasional, tetapi mengandung dimensi intelektual, emosional dan spiritual. Untuk itu, upaya mengembangkan dimensi-dimensi tersebut merupakan suatu kebutuhan. Semakin kaya dan halus (rumit, canggih) pengalaman suatu masyarakat semakin rumit pula bahasanya dan ekspresi sastra karena disitu berkembang dimensi-dimensi intelektual, emosional, dan spiritual. Dalam kasus bahasa Sunda, misalnya generasi sekarang tidak mengalami pendidikan bahasa Sunda yang lengkap dan benar yang memperhatikan dimensi intelektual, emosional, dan spiritual. Akibatnya adalah bahwa orang Sunda masa kini kadang-kadang disebut "generasi anjing". Mereka ini hanya dapat berbahasa Sunda yang kasar yang mungkin sarat dengan cacik maki karena mereka tidak memperoleh pendidikan bahasa Sunda secara lengkap.

Bahasa daerah dalam konteks itu menjadi sarana penting mengajarkan tata kesopanan dalam berhubungan dengan sesama, dengan yang lebih tua, dan enggan yang lebih muda yang. Hilangnya peluang generasi muda memperoleh pendidikan bahasa daerah secara lengkap dan benar itu dengan berbagai dimensinya mengakibatkan hilang pula kesempatan mereka untuk memperoleh nilai-nilai kesopanan dalam berkomunikasi.

Hal lain yang terkandung dalam bahasa daerah adalah peribahasa. Peribahasa itu merupakan bagian yang sangat penting dari bahasa karena dalam peribahasa tidak sematamata nilai komunikatif bahasa yang dipergunakan. Lebih jauh lagi dalam peribahasa diungkapkan pula nilai lain, yaitu kearifan milik penutur bahasa itu sebagai nilai budaya yang dimiliki masyarakat penuturnya. Sebagian dari kearifan itu kalau diwariskan dengan baik akan menjadi bekal bagi generasi muda penutur bahasa itu di dalam menghadapi berbagai persoalan hidup sekarang ini.

#### **1.4 Bahasa Daerah sebagai Pendukung Pengembangan Bahasa Indonesia**

Dalam Politik Bahasa Nasional 1975 dan Kebijakan Bahasa Nasional sebagai rumusan seminar Politik Bahasa tahun 1999 bahasa daerah diberi fungsi sebagai sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia. Serta pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia. Dalam kaitan itu, pengembangan bahasa Indonesia (dan sastranya) dapat memanfaatkan kekayaan bahasa daerah itu. Dengan demikian, jejaslah fungsi bahasa daerah sebagai sarana pengembangan bahasa Indonesia.

Pemekaran kosakata bahasa Indonesia yang memanfaatkan kosakata bahasa daerah merupakan jbaran fungsi bahasa daerah sebagai sumber pengembangan bahasa Indonesia. Selain itu, kebijakan pemerayaan kosakata bahasa Indonesia dengan kosakata bahasa daerah didasarkan pada kekayaan bahasa daerah yang menjadi sumber dengan aneka fungsinya. Dalam rangka pemodernan bahasa Indonesia untuk menampung konsep, gagasan, dan

pengalaman masyarakat daerah yang tidak tertampung dalam kosakata asal bahasa Indonesia, pemanfaatan kosakata bahasa daerah merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Demikian juga untuk keperluan menampung pemikiran yang tergalai dari budaya daerah tuntutan pemanfaatan kosakata daerah itu tidak bisa dihindari.

Pemoderenan bahasa Indonesia dengan pemanfaatan kosakata bahasa daerah tampaknya seperti sebuah ironi karena bahasa daerah sering diasosiasikan dengan tradisi yang terkait dengan masa silam. Sementara itu, yang terkandung dalam pemoderenan adalah ihwal masa depan, sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak dikenal (dalam tradisi). Untuk itu, perlu dicermati konsep pemoderenan sebagai ikhtiar untuk menjadikan sebuah bahasa memiliki kosakata yang lengkap untuk keperluan kehidupan modern, termasuk dalam memahami dan menyikapi nilai-nilai budaya yang Tidak modern. Dengan demikian, dukungan bahasa daerah sebagai sumber pemerayaan bahasa nasional merupakan keniscayaan.

## **1.5 Bahasa Daerah sebagai Kekayaan Budaya Bangsa**

Bahasa daerah di Indonesia yang jumlahnya sekitar 670 bahasa tersebar dari Sabang hingga Merauke. Dari jumlah tersebut 50 bahasa berada dalam posisi yang cukup aman untuk dapat hidup dan sisanya 620 bahasa daerah berada dalam ancaman kepunahan mengingat pendukungnya makin lama makin berkurang. Dari 50 bahasa daerah yang berada dalam posisi aman itu, kita bisa berbicara tentang kekayaan budaya bangsa. Itu pun kalau memperhatikan variasi jumlah penuturnya 10 bahasa daerah di antaranya berpenutur lebih dari 2 juta.

Sebagai kekayaan budaya bangsa, bahasa daerah yang dianggap memiliki kekayaan budaya adalah bahasa yang memiliki tradisi sastra yang kuat dan mungkin lengkap. Keterkaitan kekayaan budaya dengan sastra mutlak diperlukan karena bahasa tanpa sastra kehilangan fungsi estetikanya yang menjadikan bahasa itu memiliki lebih dari sekedar dimensi komunikasi. Kebutuhan akan adanya

sarana pengungkap pengalaman estetikalah yang menjadikan bahasa itu kaya dan sekaligus mencerminkan kekayaan batin masyarakat pendukungnya.

Kekayaan budaya itu terwujud juga dalam naskah-naskah lama. Hal ini berarti perlunya tradisi keberaksaraan yang mengiringi kehidupan bahasa itu. Pikiran, konsep, dan pengalaman yang tertuang dalam bahasa diawetkan dalam naskah sehingga keberadaan naskah sebagai bukti hidupnya tradisi keberaksaraan akan menjadi bukti adanya kekayaan budaya masyarakat pendukung bahasa yang bersangkutan.

Secara umum sastra daerah yang menjadi bagian kehidupan bahasa daerah yang menyangga nilai-nilai dan kekayaan budaya daerah memiliki berbagai fungsi. Fungsi edukatif sastra daerah memenuhi kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Fungsi rekreatif yang diemban sastra daerah memenuhi kebutuhan masyarakat akan keindahan yang antara lain, dapat dicapai melalui kekuatan imajinasi yang menjadi kandungan sastra daerah itu. Fungsi peneguhan struktur sosial seperti yang terjadi di pusat-pusat kerajaan tempat para pujangga berkarya untuk menjaga kewibawaan raja, atau di pusat-pusat keagamaan yang menghasilkan sastra religius sebagai acuan sikap dan perilaku serta tuntunan hidup masyarakat.

Dengan memperhatikan berbagai fungsi itu, jelaslah bahwa bahasa daerah itu mengandung kekayaan budaya daerah. Pemanfaatan bahasa daerah sebagai salah satu sumber pemerayaan kosakata bahasa nasional secara langsung atau tidak langsung turut pula memperkaya budaya nasional.

## **BAB II**

### **BAHASA DAERAH SEBAGAI SUMBER PEMERKAYAAN KOSAKATA BAHASA INDONESIA**

#### **2.1 Bahasa Daerah sebagai Sumber Pemerayaan Istilah**

Pemodernan bahasa mutlak diperlukan oleh bahasa yang menempati posisi bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam rangka pemodernan bahasa nasional itu, diperlukan seperangkat istilah yang dapat mewadahi konsep dan gagasan baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemodernan bahasa itu sendiri hendaknya ditafsirkan sebagai ikhtiar untuk menjadikan bahasa itu memiliki kelengkapan sistem dan kosakata, termasuk istilah untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan. Pemodernan bahasa itu sendiri menyangkut dua aspek, yakni pemekaran kosa kata dan pengembangan jumlah laras.

Kebutuhan akan istilah baru untuk mewadahi konsep ilmu pengetahuan tidak harus berorientasi kepada bahasa asing semata-mata, apalagi kalau pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang berakar pada tradisi budaya daerah, misalnya tradisi obat-obatan. Selain itu, keperluan akan istilah yang terkait dengan seni dengan berbagai cabangnya yang merupakan kekayaan budaya daerah menuntut adanya relevansi dengan akar budaya daerah yang menjadi sumber pemerayaan istilah. Bahasa daerah sebagai sumber pemerayaan istilah bahasa Indonesia hendaknya merupakan bahasa daerah yang memiliki kelengkapan tradisi dan budaya yang memadai. Tidak semua bahasa daerah memenuhi syarat untuk menjadi sumber pemerayaan istilah bahasa Indonesia. Untuk itu, hanya bahasa daerah yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi ilmu pengetahuanlah yang dapat menjadi bahasa sumber pemerayaan istilah itu. Proses pemerayaan itu pun tidak serta merta berterima di masyarakat. Untuk itu, diperlukan elaborasi yang memadai tingkat kelengkapan kata dan istilah yang dimiliki bahasa daerah itu.

## **2.2 Kriteria Pemerayaan Bahasa Indonesia dengan Kosakata Bahasa Daerah**

Ada sejumlah kriteria yang harus dipegang untuk pemasukan kosakata bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia. Kriteria itu mencakupi hal-hal berikut.

### **2.2.1 Kata yang belum ada di KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)**

Kriteria ini jelas terkait dengan kelengkapan kata dalam KBBI, atau yang sudah terkodifikasi dalam kamus yang selama ini dianggap standar. Kata yang dimaksud hendaknya tidak dikenal tetapi memiliki potensi untuk mudah dikenal dengan beberapa pertimbangan. Dengan tidak adanya kata yang dimaksud dalam hasil kodifikasi penyusunan kamus jelaslah kosakata bahasa daerah dapat mulai diperkenalkan kepada khalayak.

### **2.2.2 Kata yang berkonotasi positif**

Kata yang berkonotasi positif artinya kata yang memiliki nilai positif yang menunjukkan keluhuran budi masyarakat penuturnya. Kata yang berkonotasi positif itu hendaknya bebas dari 'nilai rasa yang mengandung tabu untuk masyarakat tertentu, tidak memberikan asosiasi yang menimbulkan rasa malu atau melanggar tabu. Kata yang berkonotasi positif itu dapat diperinci lebih jauh sebagai berikut.

#### **a. Kata kerja yang mencerminkan etos kerja tinggi**

Kata yang tergolong memiliki etos kerja tinggi adalah kata kerja yang menunjukkan sikap perilaku yang tegar menghadapi persoalan atau tantangan hidup. Untuk menentukan kata kerja seperti itu, dapat

ditempuh melalui prosedur analisis semantik kata yang dimaksud.

**b. Kata benda yang merupakan kekayaan produk budaya daerah.**

Kata benda yang merupakan kekayaan produk budaya daerah merujuk pada benda yang hanya dikenal dalam lingkungan budaya tertentu. Produk budaya itu sendiri mungkin tidak dikenal dalam masyarakat bahasa Melayu yang menjadi asal bahasa Indonesia. Kata lamin dari bahasa Dayak, misalnya, atau calung yang menjadi produk budaya Sunda.

**c. Kata yang tidak menimbulkan benturan budaya.**

Kata yang tidak menimbulkan benturan budaya ialah kata yang untuk kelompok etnik lain di luar etnik pemilik kata yang dimaksud tidak mengandung makna ataupun asosiasi negatif. Kata tabu untuk kelompok etnik tertentu tetapi tidak bagi kelompok etnik hendaknya tidak dijadikan bahan pemerikayaan kosakata bahasa Indonesia.

### **2.2.3 Kata yang Kadar Keberterimaannya Tinggi**

Kata yang kadar keberterimaannya tinggi bagi kelompok etnik lain adalah kata yang netral dari segala nilai rasa dan muatan asosiasi yang negatif. Keberterimaan yang tinggi juga ditentukan oleh bunyi kata yang enak didengar, selaras dengan kata yang sudah ada dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Kadar keberterimaan tinggi juga ditentukan oleh kemudahan dalam pengucapannya dan atau penulisannya.

#### **2.2.4 Kata yang Pernah Muncul di dalam Media Massa**

Media massa merupakan sarana ampuh pemasyarakatan kata baru. Untuk itu, kata yang muncul dan digunakan secara meluas dalam media massa dapat dipertimbangkan sebagai pilihan yang tepat. Keberterimaannya dalam masyarakat amat bergantung pada seberapa jauh kata itu hidup dan digunakan secara lebih luas di kalangan khalayak di luar kelompok etnik pemilik asal kata tersebut.

#### **2.2.5 Kata Budaya yang Tidak Ada Padanannya dalam Bahasa Indonesia**

Budaya daerah itu memiliki kekhasan yang tidak 'dimiliki oleh' budaya asal bahasa Indonesia dan budaya kelompok etnik lainnya. Dengan adanya kekhasan ini, tentulah akan ada kata budaya yang hanya dikenal dan berlaku pada budaya daerah tertentu. Untuk itu, kata budaya yang mencerminkan kekhasan budaya daerah itu merupakan pilihan untuk pemerayaan kosakata bahasa Indonesia.

#### **2.2.6 Kata Bahasa Daerah Sehari-hari**

Kata sehari-hari yang dipakai luas dalam bahasa daerah termasuk pilihan untuk dijadikan kosakata baru bahasa Indonesia. Kata sehari-hari ini memiliki kekuatan dalam hal pemakaiannya yang amat umum dalam konteks pergaulan dalam kelompok etnik pemilik kata itu. Dalam posisi serupa itu bisa jadi kata tersebut relatif dapat tembus dalam komunikasi antar kelompok etnik ketika warga etnik yang bersangkutan berhubungan dengan warga dari etnik lain. Pada gilirannya kata sehari-hari tersebut dapat pula beredar dalam komunikasi dalam bahasa Indonesia.

### **2.2.7 Kata yang Termuat dalam Puisi atau Cerita**

Kata yang termuat dalam puisi atau karya sastra pada umumnya adalah kata yang dikenal dalam lingkungan yang khusus, bukan dalam lingkungan khalayak yang luas sebagai kata sehari-hari. Berbeda dengan kata bahasa daerah sehari-hari kata yang termuat dalam puisi atau karya sastra pada umumnya jelas memiliki kadar estetika yang tinggi. Pemilihan kata yang berasal dari puisi atau karya sastra pada umumnya memang peruntukan bagi nama, nama khusus untuk anugrah atau sejenis nama penghargaan sebagaimana yang lazim berlaku pada masa pemerintahan yang lalu.

## **BAB III**

### **MEDIA PEMASUKAN KOSAKATA BAHASA DAERAH KE DALAM KOSAKATA BAHASA INDONESIA**

#### **3.1 Keluarga**

Keluarga adalah institusi permulaan tempat individu menjalani fitrahnya sebagai makhluk sosial. Di dalam keluarga itulah seorang manusia, untuk pertama kalinya, mengenali individu yang lain. orang tualah, terutama ibu, individu lain yang pertama kali ia kenal. Dari kedua orang tua itulah untuk pertama kali seorang anak mulai belajar mengenal bahasa sebagai alat komunikasi. Di dalam keluarga anak-anak pertama kali belajar tatakrama berkomunikasi dengan anggota keluarga lainnya.

Bahasa ibu, yaitu bahasa pertama yang digunakan oleh orang tua dalam berbicara dengan buah hatinya, bagi sebagian besar keluarga dan etnis di Indonesia berupa bahasa daerah. Dengan bahasa ibu itulah orang tua mengajarkan bagaimana berkomunikasi secara pantas dengan orang-orang di sekitarnya. Dengan bahasa ibu pula orang tua mengajarkan berbagai kearifan hidup melalui cerita, dongeng, atau ungkapan-ungkapan sehari-hari.

Keluarga merupakan lembaga yang paling efektif untuk memperkenalkan kekayaan kosakata dan ungkapan di dalam bahasa daerah. Orang tua sebagai anggota keluarga yang berwibawa perlu membiasakan anak-anaknya menggunakan bahasa ibu (bahasa daerah) sehingga kekayaan kosakata dengan nuansa dan keragaman maknanya tertanam di dalam benaknya. Penguasaan bahasa daerah secara memadai pada diri anak akan memungkinkan anak itu mengungkapkan konsep yang ia temui, tetapi tidak dapat dia ungkapkan dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa ibu atau bahasa daerahnya.

### **3.2 Sekolah/Perguruan Tinggi**

Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang mempunyai peluang besar dalam pemerikayaan kosakata bahasa daerah. Di sekolah anak-anak secara terbimbing dan terencana belajar tentang bahasa dan berbahasa daerah secara baik dan benar. Di sekolahlah anak-anak dapat belajar menyusun kalimat dengan kata yang pantas. Di sekolah pula anak-anak sedikit atau banyak mempelajari sistem sebuah bahasa.

Di sekolah anak-anak dapat melatih kemahirannya menggunakan bahasa daerah dengan bimbingan guru. Guru dapat menugasi anak-anak muridnya mempraktikkan kemahirannya berbahasa secara lisan atau tulis. Disamping itu, melalui sekolah anak-anak dapat mengenal adiknya (master piece) sastra daerah bermutu yang di dalamnya terdapat ajaran tentang sopan santun, semangat hidup, cinta asih antar sesama, dan hubungan makhluk dengan Sang Pencipta. Agar guru tidak mengajar secara spikulatif, perlu dipersiapkan perangkat yang memudahkan kerja guru. Perangkat yang diperlukan di sini yaitu kurikulum, bahan ajar, dan koleksi pustaka. Di samping itu, guru yang mengajar pun harus orang yang benar-benar tahu sistem bahasa daerah itu. Pengetahuan itu bukan hanya pengetahuan tata bahasa, tetapi yang lebih penting adalah pengetahuan mengenai sistem komunikasi dengan bahasa itu.

Pertanyaan yang muncul, yaitu "Pada tingkatan apa bahasa daerah perlu diajarkan? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu diskusi yang lebih mendalam sebab salah memberikan jawaban akan memberikan arah kebijakan yang salah. Namun, paling tidak pada tingkat sekolah dasar harus diberikan pelajaran bahasa daerah bukan sekedar sebagai muatan lokal.

Perguruan tinggi menyiapkan tenaga yang mempunyai minat menekuni bahasa dan kesenian daerah. Kepada lulusan perguruan tinggi itulah nantinya pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bahasa dan kesenian daerah banyak diserahkan. Diperguruan tinggi juga, melalui seminar-seminar, lahir gagasan-gagasan tentang pembinaan dan pengembangan bahasa dan kesenian daerah.

### **3.3. Lingkungan Pergaulan**

Media lain yang dapat menjadi ajang belajar bahasa bagi anak-anak, yaitu lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan, selain keluarga dan sekolah, merupakan tempat yang sangat berpengaruh bagi pertumbuhan jiwa anak. Di tempat ini pula anak mengenal berbagai kata dan istilah yang kadang-kadang terasa asing di telinga orang tua. Ketika orang tua dikejutkan oleh kata-kata yang diucapkan oleh anaknya dan kata-kata itu dirasa tidak pantas, saat inilah biasanya muncul persoalan apakah lingkungan pergaulan anak harus dibatasi. Harus diakui bahwa lingkungan pergaulan adalah tempat anakanak belajar bersosialisasi. Pembatasan lingkungan pergaulan anak berdampak pada sempitnya pengetahuan anak tentang lingkungan. Sebaliknya, membebaskan anak dalam pergaulan akan berdampak pada tak terkendalikannya perkembangan jiwa anak. Oleh karena itu, orang tua tetap diharuskan mengawasi perolehan bahasa anak-anaknya dengan cara menunjukkan cara penggunaan kata-kata secara pantas.

### **3.4 Media Massa**

Media massa merupakan sarana yang paling efektif untuk

menyampaikan informasi dari berbagai segi kehidupan. Hampir tidak ada satu pun segi kehidupan yang hidup dan berkembang tanpa peran serta media massa berbagai peristiwa yang terjadi jauh dari tempat kita tinggal dapat kita ketahui dengan cepat karena adanya media massa.

Ada dua jenis media massa yang lazim dikenal masyarakat, yaitu media massa cetak dan media massa elektronik. Kedua massa ini mempunyai peran yang sangat besar dalam memperoleh hari bahasa anak. Di bawah ini, akan diuraikan peran keduanya dalam pemerolehan bahasa daerah oleh anak-anak khususnya dalam rangka pemerayaan kosakata bahasa Indonesia.

### **a. Media Massa Cetak**

Media massa cetak yang berupa surat kabar, majalah, tabloid, buletin, dan selebaran berbahasa Indonesia sering memuat tulisan yang didalamnya terdapat kosakata dari bahasa daerah yang digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan gagasannya atau menyampaikan berita. Jika tulisan atau berita itu dibaca oleh pembaca yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan bahasa, kata dari bahasa daerah yang terdapat dalam tulisan itu tentu akan dikenal. Semakin banyak kata dari bahasa daerah itu dikenal dan dipahami oleh pembaca dari berbagai etnis, makin layak kata itu untuk dimasukkan dalam kasanah kosakata bahasa Indonesia. Namun demikian, penyertaan kosakata daerah dalam tulisan yang akan merusak bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kata daerah yang dihadirkan dalam media massa berbahasa Indonesia hendaklah katakata yang benar-benar, secara konseptual, tidak dapat dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia, misalnya, pamer, gambut, ranah, mapalus, ulayat, pela gadong, gotong royong, dan lain-lainnya.

Selain kehadiran kata daerah dalam berita dan tulisan (artikel) langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan rubrik khusus berbahasa daerah. Rubrik yang bersifat karikatur itu dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan kekayaan ragam yang terdapat dalam bahasa daerah.

## **b. Media Massa Elektronik**

Media massa elektronik yang berupa radio dan televisi merupakan sarana yang sangat besar pengaruhnya dalam memperkenalkan kata-kata baru, termasuk kata yang berasal dari bahasa daerah. Tampilan pelawak Basuki di televisi dalam mengiklankan produk jamu yang menggunakan bahasa Jawa sangat efektif dalam memperkenalkan kosakata bahasa daerah kepada masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Kata bablas terus pergi yang hadir dalam iklan itu secara serta-merta dikenal oleh para penonton televisi dimanapun mereka berada.

Hal yang sama juga terjadi ketika televisi menayangkan iklan layanan masyarakat tentang ajakan untuk menyukseskan pemilu yang telah lalu. Ketika acara itu digemari masyarakat dikenalkan dengan kata-kata dari salah satu bahasa daerah di Indonesia.

Pementasan cerita daerah melalui media massa elektronik walaupun berbahasa bahasa Indonesia, kenyataannya masih banyak diselipi kosakata bahasa daerah dalam dialog-dialognya. Ketika acara itu digemari masyarakat, mau tidak mau masyarakat akan mengenal kosakata daerah itu. Tentu itu akan berlanjut dengan keinginan untuk memahami makna kata itu. Pendek kata media, massa elektronik sangat berperan memperkenalkan kosakata daerah kepada masyarakat Indonesia.

## **3.5 Karya Sastra**

Karya sastra Indonesia berlatar budaya daerah yang ditulis oleh sastrawan daerah, seperti Pengakuan Pariyem yang ditulis oleh Linus Suryadi A.G. atau Upacara yang ditulis oleh Korie Layun Rampan, banyak mengungkapkan kata-kata budaya khas daerah. Kepopuleran karya itu menjadikan pembaca dari berbagai daerah di Indonesia mengenal khasanah budaya etnis melalui kosakata budaya yang dihadirkan dalam karya sastra.

Karya sastra daerah yang merupakan adikarya (master piece) memuat ungkapan kearifan lokal. Salah satu contoh ungkapan

yang sangat dikenal itu jaman edan dari Ronggowarsito yang kemudian dirangkai dengan yen ora edan ora keduman sehingga menjadi jaman edan yen ora edan ora keduman 'kala zaman sudah gila kalau tidak gila tidak kebagian.

Tentu kalau digali secara terus-menerus akan banyak ditemukan ungkapan-ungkapan kearifan yang terdapat di dalam karya sastra dalam bahasa daerah.

Berdasarkan kenyataan itu penulisan kembali cerita daerah dengan medium bahasa Indonesia perlu digalakkan. Penulisan kembali dengan medium bahasa Indonesia itu tentu tak sepenuhnya dapat mengungkapkan kekhasan khasanah budaya daerah sehingga dengan penulisan ini memberi peluang masuknya kosakata daerah ke dalam kosakata bahasa Indonesia. Di samping itu, penulisan kembali dengan bahasa Indonesia apakah dengan menyadur atau menerjemahkan, akan memperluas khasanah pembaca adikarya bahasa dan kesenian daerah.

#### **BAB IV KEGIATAN DAN PELAKU**

Hakikat bahasa daerah dan fungsi bahasa daerah dalam konteks kebudayaan nasional, dalam ranah apa kosakata dapat berperan dalam pemerdayaan kosakata bahasa Indonesia serta sarana atau instrumen apa yang dapat digunakan untuk memasukkan kosakata bahasa daerah ke dalam kosakata bahasa Indonesia telah dibahas pada bab-bab terdahulu. Upaya-upaya untuk meningkatkan peran bahasa Daerah dalam memperkaya bahasa Indonesia itu tentu harus diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang didukung oleh pelaku yang berpotensi mengembangkan dan mengaktifkan penggunaan bahasa daerah sesuai dengan profesi yang dipilihnya. Kegiatan itu dapat dilaksanakan secara sektoral (departemen) atau lintas sektoral (lintas departemen).

Kegiatan sebagai wahana mengembangkan dan mengaktifkan penggunaan kosakata bahasa daerah dalam konteks budaya nasional

harus berfungsi konservasi, preservasi, pelestarian, dan pemanfaatan. Di samping itu, kegiatan itu juga bersifat pembinaan dan pengembangan. Dalam konteks pembinaan kegiatan bertujuan (1) meningkatkan sikap positif penutur bahasa dan sastra daerah; (2) meningkatkan daya apresiasi masyarakat; dan (3) meningkatkan pengetahuan masyarakat penutur bahasa daerah. Kegiatan yang bersifat pengembangan antara lain bertujuan (1) memantapkan sistem bahasa daerah (2) memantapkan fungsi dan kedudukan bahasa dan sastra daerah; dan (3) meningkatkan keragaman bentuk apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan sastra daerah.

#### **4.1 Kegiatan**

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya peningkatan peran bahasa daerah dalam memperkaya bahasa Indonesia ini dapat dipilah menjadi dua, yaitu :

- (1) Kegiatan pengembangan, yaitu seminar dan penelitian, penerjemahan, penyusunan dan penerbitan.
- (2) Kegiatan pembinaan, yaitu lomba, pemberian penghargaan, dan pementasan.

Di bawah ini akan dijabarkan sasaran dan tujuan kegiatan itu.

##### **a. Seminar dan Penelitian**

Seminar dilakukan untuk menggali pikiran-pikiran baru mengenai upaya memantapkan peran bahasa daerah, sedangkan penelitian dilaksanakan dilakukan untuk mendapatkan temuan-temuan baru yang berkaitan dengan upaya pengembangan, pemanfaatan, pelestarian bahasa daerah dalam rangka pemantapan fungsi bahasa daerah baik sebagai wahana komunikasi di tingkat daerah maupun sebagai sumber pemerikayaan kosakata bahasa Indonesia.

##### **b. Penerjemahan**

Upaya pemantapan peran bahasa daerah sebagai sumber

pemerayaan kosakata bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan menerjemahkan adikarya sastra daerah kedalam bahasa Indonesia. Dengan penerjemahan ini terbuka peluang bagi adikarya daerah untuk dikenal dan diapresiasi oleh khalayak yang lebih luas. Dengan demikian, nilai-nilai lokal yang tadinya hanya diapresiasi oleh masyarakat penutur bahasa daerah dalam karya sastra saja, kemudian diapresiasi juga oleh penutur bahasa daerah lain. Jika nilai-nilai itu mereka terima, nilai-nilai itu tidak hanya milik daerah tetapi akan menjadi milik nasional.

Adanya konsep dalam karya sastra yang tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memberi peluang penerjemah memasukkan kosakata daerah ke dalam karya terjemahannya. Hal ini memungkinkan kosakata daerah itu dikenal oleh masyarakat pembaca yang lebih luas. Penyusunan kata-kata daerah dalam sebuah daftar berikut padanannya dalam bahasa Indonesia akan memudahkan pembaca memahami makna kata-kata itu.

### **c. Penyusunan**

Kegiatan penyusunan ini bersifat konservasi. Kegiatan perlu dilakukan karena berdasarkan kriteria pemasukan kosakata bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia cukup banyak. Banyaknya kriteria ini memberi peluang yang sangat kecil bagi bahasa daerah kedalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan mutiara-mutiara kata daerah yang mengungkapkan kearifan lokal. Kegiatan nyata yang dapat dilakukan misalnya penyusunan kamus, penyusunan leksikon yang bermuatan mengungkapkan hidup, penyusunan leksikon yang mengungkapkan tabu atau pantang.

### **d. Penerbitan**

Naskah hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut di atas harus dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, dilakukan penerbitan dan penyebaran ke tengah-tengah masyarakat. Di samping itu, dengan penerbitan dan penyebaran

ini memberi kesempatan masyarakat untuk mengapresiasi karya-karya daerah.

#### **e. Lomba**

Lomba dilakukan dengan tujuan untuk (1) membangkitkan kembali minat masyarakat terhadap penciptaan karya sastra berbahasa daerah; (2) meningkatkan minat masyarakat mencipta karya berinitiatif dalam bahasa daerah; (3) menyediakan sarana bagi masyarakat untuk mewujudkan kreativitasnya. Sasaran lomba ini dapat pelajar, wartawan, seniman, atau pemerhati bahasa dan sastra daerah.

#### **f. Pemberian Penghargaan**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan apresiasi terhadap pribadi-pribadi yang telah dengan sungguh-sungguh mengabdikan dirinya pada pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan bahasa daerah di dalam kehidupan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai adanya karya bermutu. Kegiatan ini juga dapat memancing minat seniman untuk menghasilkan karya yang bermutu.

#### **g. Pementasan**

Pementasan karya dengan bahasa daerah menunjukkan masih adanya 'kehidupan bahasa dan kesenian daerah. Pementasan ini diadakan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para seniman untuk mempertunjukkan (memperkenalkan) karyanya di depan masyarakat. Pementasan kesenian daerah dengan bahasa Indonesia yang diselipi bahasa daerah menjadikan kata-kata daerah itu dikenal oleh masyarakat yang luas, sehingga berpeluang menambah perbendaharaan kata bahasa Indonesia.

### **4.2 Pelaku**

#### **a. Instansi Pemerintah**

Instansi pemerintah, baik inter departement maupun lintas

departemen, di Pusat dan di daerah, melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa dan kesenian daerah dengan menyediakan fasilitas bagi terselenggaranya kegiatan yang berkaitan dengan upaya pembinaan dan pengembangan bahasa dan kesenian daerah. Dalam melaksanakan fungsinya, instansi pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak-pihak, misalnya perguruan tinggi, organisasi profesi di bidang bahasa dan kesenian daerah, dan sanggar-sanggar. Dengan demikian instansi pemerintah dapat berfungsi sebagai (1) pembuat kebijakan (2) fasilitator; dan/atau (3) penyelenggara.

## **b. Organisasi**

Organisasi profesi yang anggotanya terdiri atas pribadi-pribadi yang dengan sungguh-sungguh menekuni bidang bahasa dan kesenian daerah sangat diperlukan dalam pembinaan, pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan bahasa dan kesenian daerah. Dengan berbagai kegiatan yang terencana dan didukung oleh orang-orang yang mumpuni dalam bidangnya, organisasi sangat diharapkan berperan aktif dalam rangka pembinaan, pengembangan, pelestarian, dan pemantapan fungsi bahasa dan kesenian daerah. Organisasi juga dapat berperan sebagai penghubung pemerintah sebagai pembina bahasa dan kesenian daerah dengan para seniman dan pemerhati bahasa dan kesenian daerah dalam melaksanakan kegiatannya. Di samping itu, organisasi juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan bahasa dan kesenian daerah.

## **c. Seniman (pendongeng, dalang, penulis)**

Seniman sebagai pelaku seni sangat berperan dalam melestarikan, mengembangkan, dan menyebarkan nilai-nilai yang terhimpun dalam kosakata bahasa daerah. Melalui pementasan atau penerbitan karya-karyanya seniman memberi peluang masyarakat untuk mengapresiasi kekayaan bahasa dan kesenian daerah. Semakin sering seniman mementaskan dan menerbitkan karya-karyanya makin banyak peluang masyarakat untuk mengapresiasi kekayaan bahasa dan kesenian daerah.

#### **d. Guru/Dosen**

Guru atau dosen adalah pribadi yang sangat berkepentingan dengan pelestarian dan pengembangan bahasa daerah melalui sekolah. Dengan berpegang pada kurikulum dan silabus, bahan ajar, serta ketrampilan mengajar mereka mengajari dan menunjukkan bagaimana menggunakan bahasa itu secara efektif. Guru/dosen juga dapat menanamkan nilai-nilai yang terdapat dalam bahasa dan sastra daerah.

#### **e. Peneliti**

Peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai objek yang ditelitinya dan untuk mendapatkan temuan-temuan baru. Sesuai dengan sifat dan tujuannya kegiatan ini dapat bersifat terapan, pengujian, atau penemuan. Hasil kerja para peneliti itu dapat berupa bahan peruinusan kebijakan, bahan pengajaran, atau bahan pembakuan.

#### **f. Penerjemah**

Seorang penerjemah menerjemahkan karya-karya sastra daerah ke dalam bahasa Indonesia atau asing. Dengan karya terjemahannya itu, seorang penerjemah secara tidak langsung telah menyebarkan kekayaan kebudayaan daerah ke tengah masyarakat luas. Karena karya terjemahan, itu, masyarakat di luar kelompok etnis mengetahui adanya nilai-nilai universal dalam kebudayaan di luar etnisnya.

#### **g. Tokoh**

Sifat masyarakat Indonesia yang paternalitis berkecenderungan meniru apa yang dilakukan oleh tokoh idolanya. Sementara itu, dengan kewibawaan seorang tokoh dapat mempengaruhi masyarakat dalam berperilaku. Perilaku seorang tokoh dalam berbahasa sangat berpengaruh terhadap kebiasaan berbahasa masyarakat. Seorang tokoh yang secara hati-hati menyisipkan kata-kata daerah ketika ia berbicara dalam bahasa Indonesia sangat berdampak terhadap

penggunaan kata-kata daerah itu selanjutnya. Betapa dahsyatnya pengaruhnya ketika seorang pemimpin mengucapkan ungkapan mikul dhuwur mendhem jero mengangkat tinggi-tinggi (kebaikan) dan mengubur dalam-dalam (kejelekan) orang tua dan balela membangkang. Ungkapan itu dengan cepat populer karena yang mengucapkan seorang yang mempunyai pengaruh.

## **BAB V PENUTUP**

Sebagai penutup tulisan ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan pemekaran kosakata bahasa Indonesia dengan kosakata bahasa daerah.

1. Fungsi dan kedudukan bahasa Daerah dalam konteks kebudayaan nasional
2. Fungsi dan kedudukan bahasa Daerah dalam konteks politik bahasa nasional
3. Kriteria yang digunakan dalam memasukkan kosakata bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia
4. Keberagaman media yang dapat digunakan
5. Fungsi dan jenis Kegiatan yang mendukung pemekaran kosakata bahasa Indonesia dengan kosakata bahasa daerah
6. Kegiatan yang berkaitan dengan pemekaran kosakata bahasa Indonesia dengan bahasa daerah dan pelaksanaannya
7. Pelaku yang dengan sungguh-sungguh menekuni bahasa dan kesenian daerah

# LAMPIRAN

**PEMANFAATAN KOSAKATA BAHASA DAERAH  
DALAM PEMERKAYAAN KOSAKATA  
BAHASA INDONESIA**

**ABDUL ROZAK ZAIDAN**

**JAKARTA  
2003**

# PEMANFAATAN KOSAKATA BAHASA DAERAH DALAM PEMERKAYAAN KOSAKATA BAHASA INDONESIA

## Pengantar

Bahasa daerah dalam konteks Politik Bahasa di Indonesia, baik dalam rumusan Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1975 maupun dalam rumusan Seminar Politik Bahasa tahun 1999, telah diberi fungsi, antara lain, sebagai sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia. Ditambahkan pula bahwa dalam keadaan tertentu bahasa daerah dapat juga berfungsi sebagai pelengkap bahasa Indonesia di dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah. Kebijakan yang menempatkan bahasa daerah sebagai pendamping bahasa Indonesia dalam konteks pemerintahan di daerah tertentu didasarkan pada kenyataan bahwa masih banyak orang Indonesia di desa-desa yang belum menguasai bahasa Indonesia sepenuhnya sehingga komunikasi dengan dan di antara mereka menggunakan bahasa daerah. Ihwal seperti ini menunjukkan bahwa sebagai bagian dari kebudayaan daerah bahasa daerah masih menjadi kenyataan hidup sehari-hari.

Apresiasi masyarakat terhadap bahasa daerah sebagai bagian kebudayaan daerah dapat dilihat dari maraknya kehendak untuk menyelenggarakan kongres bahasa daerah, seperti Kongres bahasa Sunda, bahasa Bali, dan bahasa Jawa. Juga pada penghujung tahun 2002 kita mendengar adanya semikongres bahasa Aceh di Banda Aceh di tengah situasi yang tidak atau kurang kondusif. Hal yang sama kita dengar juga dari Kendari, Larantuka, dan Jayapura di Papua. Namun, tiga yang disebut terakhir baru dalam batas rencana yang pewujudannya masih menunggu situasi yang tepat. Memang semangat untuk "memelihara" bahasa daerah dalam era otonomi merupakan ihwal yang untuk beberapa pihak melegakan dan untuk pihak yang lain menimbulkan rasa was-was. Yang pertama terkait dengan sikap dan pandangan yang semata-mata didasarkan pada kepentingan budaya, sedangkan yang kedua cenderung mengaitkan ihwal mengentainya rasa kedaerahan yang disikapi dengan

pandangan atau pertimbangan politik semata-mata.

Upaya pengembangan apresiasi budaya daerah yang diharapkan dapat melestarikan budaya daerah dapat berkembang menjadi sikap positif masyarakat terhadap budaya daerah pada era globalisasi. Pengembangan kosakata bahasa Indonesia dengan memanfaatkan kosakata bahasa daerah hendaknya dipandang sebagai salah satu alternatif di tengah-tengah upaya pemekaran kosakata bahasa Indonesia dengan memanfaatkan bahasa internasional yang tak terelakkan. Situasi ketakterelakkan ini memang sudah ditanggapi oleh pakar peristilahan dengan mengubah prosedur penyerapan kata dan istilah yang disesuaikan dengan tuntutan zaman. Prosedur baru tersebut dalam penyerapan kata dan istilah asing tidak lagi memberikan prioritas kepada bahasa serumpun kalau saja langkah tersebut dinilai kurang efektif.

Pemekaran kosakata bahasa Indonesia dengan memanfaatkan kosakata bahasa daerah sekilas memberikan kesan menyilangi prosedur penyerapan kata yang baru tersebut. Namun, tuntutan akan pemberian peluang yang sama dalam hal pengembangan bahasa Indonesia untuk semua pihak yang mendasari semangat otonomi, menjadi dasar yang kuat untuk "menyilangi" prosedur penyerapan kata yang baru. Tentulah kebijakan seperti itu harus berorientasi pada kebutuhan yang lebih besar. Kini kita dihadapkan pada ancaman yang berupa perpecahan bangsa. Ancaman tersebut tentu harus disikapi dengan menanamkan perasaan kepemilikan yang kuat akan bahasa nasional, yang salah satu wujudnya adalah rasa keterwakilan dalam pemerdayaan kosakata bahasa nasional itu.

### **Otonomi Daerah, Jatidiri, dan Tuntutan Globalisasi**

Reformasi telah membawa kita pada model penyelenggaraan negara yang berorientasi pada pemberdayaan daerah yang berwujud dalam bentuk sistem pemerintahan yang otonom. Dengan pemerintahan yang otonom itu daerah dapat mengelola pemerintahan sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam daerah yang bersangkutan, kecuali dalam beberapa hal yang berkaitan dengan

urusan keagamaan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan luar negeri. Kebudayaan daerah menjadi pempunan pemerintah di daerah untuk difungsikan sebagai jatidiri daerah, apalagi kalau dari segi sosial ekonomi daerah itu memiliki keunggulan. Daerah yang telah memiliki tradisi seni dan budaya yang maju pun memandang akan pentingnya kebudayaan itu sebagai bagian kehidupan masyarakat yang diayominya.

Implikasi Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah terhadap sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi politik amat tampak. Akan tetapi, implikasinya terhadap sektor budaya di luar itu, khususnya seni dan bahasa tidak terlalu kentara, apalagi terhadap sektor budaya yang tidak menghasilkan uang. Kehendak pemerintah daerah untuk memperhatikan kehidupan dua sektor budaya tersebut terkesan lamban, bahkan seolah-olah ada anggapan bahwa penanganan kedua masalah tersebut dalam bentuk penyediaan sarana pengembangan penggarapannya untuk sementara "ditunda" karena dianggap sebagai barang mewah. Tentu saja tidak semua ihwal seperti itu terjadi di semua daerah, lebih-lebih di daerah yang selama ini dikenal sebagai daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan sekaligus memiliki kekayaan budayanya sebagai salah satu wujud kekuatan sumber daya manusiannya.

Dalam konteks daerah di Indonesia kedua sumber daya tersebut seringkali tidak berjalan seiring atau memperlihatkan gejala ketimpangan. Ada daerah yang kekayaan sumber daya alamnya didukung dengan sumber kekayaan budayanya. Ada daerah yang kekayaan sumber daya alamnya rendah tetapi memiliki sumber daya manusia yang tinggi. Yang paling malang adalah daerah yang sumber daya alam dan sumber daya manusiannya terbatas. Setiap daerah menghadapi persoalan jatidiri terkait dengan status kedaerahannya tanpa memandang keadaan yang diuraikan tersebut. Jati diri itu menjadi amat penting dalam konteks otonomi daerah. Setiap daerah seperti "berlomba" dalam mencari dan mewujudkan jatidirinya. Salah satu sumber untuk jatidiri kedaerahan itu adalah budaya daerah, khususnya bahasa dan sastra daerah. Maraknya

penyelenggaraan pentas seni daerah di beberapa daerah, seminar yang mengambil topik seni dan budaya daerah, menunjukkan adanya kehendak mencari dan meneguhkan jatidiri kedaerahan itu. Penyelenggaraan kongres bahasa daerah seperti disinggung di atas menunjukkan ihwal yang sama. Beberapa waktu yang lalu ada satu pemerintah daerah yang memberikan dana cukup besar untuk penyusunan tata bahasa daerah yang bersangkutan dan ada juga pemerintah daerah yang memilih beberapa terbitan cerita rakyat daerah yang terkait dengan daerahnya untuk dijadikan bacaan anak-anak di sekolah masing-masing. Kedua hal tersebut juga menunjukkan gejala mengentainya kehendak mencari dan meneguhkan identitas kedaerahan itu.

Otonomi daerah memang tampaknya menyimpan sejenis bom waktu bagi keutuhan NKRI yang dapat disebut sebagai disintegrasi bangsa. Namun, untuk "menjinakkan" bom waktu itu, kita perlu berpikir dan bersikap bijak. Dalam kaitan itulah, kita sepatutnya mempertimbangkan pernyataan Jacob Utama. (2001: x) yang memandang ihwal ancaman disintegrasi sebagai arus balik yang substansinya tetap berasal dari aspirasi yang sama, yakni mencari perumahan negara dan pemerintahan yang membuat betah bagi kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara, yang lebih sanggup mewujudkan aspirasi kerakyatan, keadilan, dan kesejahteraan.

Globalisasi adalah tantangan, lain yang harus dihadapi. Dalam globalisasi itu terjadi pengaburan batas geografis yang berimplikasi pada mengaburnya batas-batas ekonomi, politik, dan kebudayaan antar bangsa. Sebagai sebuah tantangan yang tak terelakkan, globalisasi harus dihadapi dengan peningkatan SDM yang dapat bersaing dengan bangsa lain karena kedudukan suatu bangsa akan ditentukan oleh keunggulan daya saingnya. Dengan bertolak dari pemikiran. Waters, Asim Gunarwan (dalam Hasan Alwi, dkk. 2000; 49) merumuskan bahwa globalisasi itu adalah proses yang menyebabkan masyarakat nagara-negara (atau bangsa-bangsa) menjadi semakin saling terhubung di dalam aspek-aspek ekonomi, budaya, dan (implikasinya) politik mereka. Hal ini dimungkinkan oleh kaburnya batas-batas geografis akibat pesatnya

kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, transportasi, dan komunikasi. Dalam situasi yang diciptakan oleh globalisasi inilah kita harus siap berada dalam kontrol masyarakat dunia internasional termasuk di dalam upaya mempertahankan keutuhan NKRI.

Jatidiri bangsa "diapit" oleh situasi yang ditimbulkan kebijakan otonomi daerah pada satu sisi dan situasi hubungan antar negara dan antarbangsa yang mengglobal sebagai implikasi globalisasi pada sisi yang lain. Pada situasi keterapitan seperti itu jatidiri bangsa, lebih-lebih lagi jatidiri kedaerahan, dalam konteks keindonesiaan menjadi sesuatu yang perlu dicermati. Hal ini berarti bahwa dalam konteks keindonesiaan jatidiri kedaerahan hendaknya menjadi sesuatu yang niscaya sebagai perwujudan Otonomi Daerah. Jadi, jatidiri kedaerahan amat relevan dengan Otonomi Daerah agar kebhinekaan yang merajut keindonesiaan menjadi tanda kemajemukan budaya di Indonesia.

Ada anggapan bahwa dalam pergaulan dunia antar bangsa yang makin mengglobal tidak dikenal lagi jatidiri kebangsaan apalagi pula jatidiri kedaerahan. Untuk menanggapi situasi seperti itu, ada baiknya kita renungkan pernyataan Anton Moeliono (1989: 3) bahwa sikap yang dapat menghargai warisan maknawi masyarakatnya, yang tahu akan harga diri, yang sadar akan baik buruk sekelilingnya dan yang tidak menaruh fobi terhadap seni budaya asing, membawa kita ke arah suatu patriotisme yang menjadi obat mujarab untuk mengurangi dan menghapuskan cacat cela dan benalu yang masih nekat pada tubuh jelita ibu Pertiwi: kebodohan, kemiskinan, feodalisme, dan kemaksiatan.

### **Dasar Pemerdayaan Kosakata Bahasa Indonesia**

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang jumlah penutur utamanya berada jauh di bawah jumlah penutur utama bahasa daerah besar seperti Jawa dan Sunda. Banyak anggapan bahwa pilihan para pemuda pencetus Sumpah Pemuda 1928 itu merupakan pilihan bijak. Pilihan tersebut terbukti tidak menimbulkan masalah politik di belakang

hari karena ditilik dari luas daerah persebarannya bahasa tersebut menempati peringkat pertama. Dalam perkembangannya bahasa Indonesia telah berasimilasi dengan bahasa-bahasa Nusantara dalam pemekaran kosakatanya. Begitulah dalam bahasa Indonesia ditemukan kata yang antara lain berasal dari bahasa Jawa, Sunda, Aceh, dan Bali. Di dalam lingkungannya sebagai bahasa nasional bahasa Indonesia menjadi bahasa masyarakat multikultural, bahasa masyarakat dengan ciri pluralisme budaya yang kental.

Situasi kebahasaan di Indonesia menunjukkan adanya kontak bahasa antara bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa daerah, dan bahasa asing. Situasi kebahasaan seperti itu diatur sedemikian rupa dalam rumusan Politik Bahasa menyangkut "pembagian" kedudukan dan fungsi masing-masing yang berbeda. Dengan mengikuti rumusan dalam Politik Bahasa seperti yang tertuang dalam buku Hasan Alwi dan Dendy Sugono (2000: 220), dapat dirumuskan ihwal kedudukan dan fungsi bahasa daerah sebagaimana yang pernah disinggung pada awal karangan ini secara terinci fungsi bahasa daerah itu adalah sebagai (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, (3) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, serta (4) pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia.

Di dalam hubungannya dengan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai (1) pendukung bahasa Indonesia, (2) bahasa pengantar pada tingkat permulaan sekolah dasar di daerah tertentu untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan/atau pelajaran lain, dan (3) sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia. Dalam keadaan tertentu, bahasa daerah dapat juga berfungsi sebagai pelengkap bahasa Indonesia di dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah.

Penetapan fungsi bahasa daerah dalam kaitannya dengan bahasa nasional dan bahasa asing seperti dipaparkan di atas menunjukkan pengakuan akan eksistensi bahasa daerah dengan mendasarkan pada ketentuan UUD 1945 tentang kebudayaan daerah, termasuk di dalamnya bahasa daerah. Selain itu, penetapan tersebut merupakan implikasi penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara

sebagaimana tersurat dalam Pasal 36 UUD 1945.

Hubungan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah di Nusantara dan bahasa asing menunjukkan gejala pendampingan bahasa. Dalam pandangan Moeliono (1989: 156) pendampingan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah menimbulkan asimilasi yang di satu pihak dapat membantu asimilasi bangsa dan di pihak lain dapat menjamin kelangsungan hidup bahasa daerah Nusantara yang bersangkutan yang harus menyesuaikan dirinya dengan arus perkembangan masyarakatnya. Dalam pandangan Masinambouw (dalam Libertiy P. Sihombing dkk.: 302) pendampingan bahasa itu akibat kemajemukan bahasa dan kemajemukan bahasa sedikit banyak mencerminkan pula kemajemukan kebudayaan yang bersangkutan. Lebih lanjut. Masinambouw menyimpulkan bahwa pada tingkat perkembangannya sekarang struktur dan leksikon bahasa Indonesia mengalami tekanan yang berat ke dua arah. Pertama arah akomodasi struktural dan leksikal menyangkut kemampuannya mengungkapkan berbagai konsep dan sistem konseptual yang baru dan kompleks, baik yang bersumber dari pengembangan global maupun dari usaha mengembangkan lapangan kehidupan modern. Arah kedua menyangkut kemampuannya mengakomodasi tuntutan untuk menjadi alat ekspresif dari hubungan antar manusia pada tingkat primordial. Di dalam konteks perhubungan yang rumit ini kita dihadapkan pada keharusan memperkaya kosakata bahasa Indonesia, yaitu salah satu alternatifnya menjadi bahan kajian kita kini.

### **Jalan Masuk Kosakata Bahasa Daerah ke dalam Bahasa Indonesia**

Pokok utama yang harus diperhatikan adalah bahwa bahasa Indonesia adalah sesuatu hal dan bahasa daerah adalah sesuatu hal yang lain. Memang antara keduanya terikat hubungan fungsional dan juga emosional sehingga antara keduanya terjalin hubungan resiprokal: saling memberi dan saling menerima. Gejala pendampingan bahasa sebagaimana disinggung di atas mempertegas hubungan resiprokal ini. Untuk keperluan kita sekarang, pembahasan

akan dibatasi pada masalah pemerayaan kosakata bahasa Indonesia melalui pemanfaatan kosakata bahasa daerah.

Upaya pengembangan kosakata dalam bahasa Indonesia sudah menjadi perhatian utama kalangan leksikograf. Secara khusus Moeliono (1989: 157) mengemukakan konsep pemoderenan bahasa Indonesia sebagai usaha menjadikan bahasa itu bertaraf sederajat secara fungsional dengan bahasa lain yang lazim disebut bahasa terkembang yang sudah mantap. Usaha tersebut mencakupi pertama pernekarana kosa kata dan kedua pengembangan jumlah laras (register)nya dan bentuk-bentuk wacananya. Pernekarana kosakata merupakan tuntutan kehidupan modem yang berkaitan dengan meluasnya cakrawala sosial budaya masyarakat pengguna bahasa itu. Masalah yang dihadapi dalam usaha ini menurut Moeliono, menyangkut masalah sumber bagi unsur leksikal yang baru dan cara membentuk unsur yang baru dan memadukannya dengan kosakata yang sudah ada. Masalah sumber dalam konteks perbincangan kita sudah ditentukan, yakni bahasa daerah. Masih terkait dengan ihwal pengembangan kosakata Kridalaksana (dalam Alwi, dkk: 2000) menyarankan tiga program, yakni (1) pengembangan leksem menjadi kata melalui gramatikalisasi, (2) penajaman konsep melalui sistem semantis, dan (3) perluasan konsep melalui pertemuan dengan kebudayaan lain atau kontak budaya. Yang amat terkait dengan pokok bahasan kita sekarang tampaknya adalah program ketiga. Harus ditambahkan segera bahwa kebudayaan lain di sini adalah kebudayaan dalam lingkup bahasa daerah Nusantara.

Pilihan pemekaran kosakata melalui pemasukan kosakata bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia terkait dengan upaya merekat rasa persatuan bangsa sebagai kebijakan yang harus didukung dengan baik. Bagaimana atau apa jalan masuk bagi kosakata bahasa daerah berdasarkan pengamatan selintas dapat dikelompokkan ke dalam 5 jalan. Kelima jalan atau cara yang dimaksud adalah sebagai berikut.

## **1. Penciptaan karya sastra bernuansa kedaerahan**

Yang melakukan kegiatan ini tentulah para pengarang. Dari beberapa data, ditemukan beberapa pengarang yang telah menciptakan karya sastra bernuansa kedaerahan adalah Umar Kayam dengan Sri Sumarah dan Bawuk, Linus Suryadi AG dengan Pengakuan Pariyem, yang memasukkan kosakata bahasa Jawa; Corrie Layun Rampan dengan Upacara, dan beberapa kumpulan cerpen mutakhirnya, yang memasukkan bahasa Dayak Kenyah; Ahmad Tohari dengan trilogi novelnya Ronggeng Dukuh Paruk, Kemukus Dini Hari, dan Jantera Bianglala, yang memasukkan kosakata bahasa Jawa; Oka Rusmini dengan novelnya Tarian Bumi, yang memasukkan kosakata bahasa Bali, Gus tf Sakai dengan novelnya Tambo: sebuah Perternuan, yang memasukkan kosakata bahasa Minangkabau, Taufik Ikram Jamil dengan kumpulan cerpennya Sandiwara Hang Tuah dan Membaca Hang Jebat, yang memasukkan kosakata bahasa Riau, dan seorang pengarang Malaysia Siti Zainon Ismail dengan kumpulan karangannya yang berjudul Jurai Palma, yang beberapa cerpen dan prosa liriknya memasukkan bahasa Aceh. Tentulah penyebutan judul-judul di atas tidak cukup memadai, tetapi menderetkan semua kosakata yang termuat dalam karya tersebut juga tidak menghemat. Untuk itu, berikut didaftarkan beberapa kata yang termuat dalam KBBI yang dipakai juga dalam novel atau karya sastra untuk sekedar ilustrasi seperti teruk, teteh, embak (mbak), pengat, meunasah, lamin, pontoh (puntuh), seudati, nduk, dan mas.

## **2. Pengungkapan konsep budaya daerah oleh tokoh masyarakat**

Media yang sering menjadi sarana pengembang kosakata yang diperkenalkan oleh tokoh masyarakat adalah radio, televisi, dan surat kabar. Kata-kata dan ungkapan seperti mbalelo, lengser keprabon, istigosah, dan rereongan sarumpi sampai kepada kita melalui pemyarakatan media massa. Ihwal pemasukan kosakata bahasa daerah seperti ini amat bergantung pada kehendak atau kesadaran tokoh masyarakat atau tokoh berkharisma. Tidak semua

tokoh yang berasal dari semua etnis memiliki "keberanian" berbuat seperti itu.

### **3. Pengindonesiaan sastra daerah, termasuk wayang**

Pengindonesiaan sastra, termasuk wayang akan menghasilkan pemakaian kosakata bahasa sastra daerah yang diindonesiakan. Pemasyarakatan kosakata bahasa daerah melalui cara ini menghasilkan pengembangan kosakata bahasa Indonesia atas jerih payah penerjemah. Tentulah kerja sama penerjemah sebagai pengonsep awal dengan penampil karya atau dalang dalam hal wayang dan aktor dalam seni pertunjukan sebagai penyampai ke khalayak akan mengefektifkan sampainya kosakata yang diterjemahkan tersebut kepada khalayak pengguna bahasa.

### **4. Iklan niaga**

Iklan niaga merupakan jalan lempang bagi sampainya kosakata bahasa daerah kepada khalayak iklan Supertin, misalnya telah memperkenalkan "jrekk.. nong" dari dalang Asep Sunandar penutur bahasa Sunda, "wes kewes-kewes bablas angine" dari kalangan etnis Jawa populer juga melalui cara dan sarana iklan di media televisi.

### **5. Pengungkapan nilai budaya melalui buku**

Ketika ramai membentuk lembaga budaya kedaerahan kita mengenal beberapa nama lembaga seperti Javanologi, Sundanologi, dan Baliologi telah menghasilkan beberapa buku yang menampilkan manusia kelompok etnis yang bersangkutan. Begitulah kita mengenal buku tentang Manusia Jawa yang ditulis oleh Marbangun Hardjowirogo dan Manusia Sunda oleh Ajip Rosidi, misalnya merupakan cara kelima ini. Namun, sampai tidaknya pemerikayaan kosakata bahasa daerah melalui cara ini amat bergantung pada dibaca tidaknya buku tersebut di tengah-tengah rendahnya minat baca di kalangan masyarakat kita dewasa ini.

## **Penutup**

Ihwal pengembangan kosakata bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia yang dalam karangan ini dipumpunkan pada upaya pernekaratan kosakata merupakan hasil tilikan sesaat yang masih perlu dikembangkan lebih jauh dan sekaligus dilengkapi dengan informasi yang memadai. Kerangka pikir yang melandasi penyiapan karangan ini masih harus ditata kembali menjadi kerangka yang lebih dapat dipertanggung jawabkan. Apa yang dapat disajikan dalam karangan ini hendaknya diperlakukan sebagai rambahan awal untuk ditindaklanjuti oleh pihak yang meminati masalah tersebut.

Kita menyadari bahwa situasi diglosis masyarakat kita amat menantang untuk kerja penelitian yang lebih bersegi. Persoalan yang muncul tentulah harus diletakkan pemecahannya pada kerangka pemantapan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dan bahasa daerah, serta bahasa asing dalam sesuai dengan garis kebijakan kebahasaan yang dirumuskan dalam Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1975 dan dikukuhkan kembali dalam seminar Politik Bahasa tahun 1999.

Jakarta, 27 Juli 2003

Abdul Rozak Zaidan  
Pusat Bahasa, Jakarta

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan, Dendy Sugono, Abdul Rozak Zaidan. 2000. Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Alwi, Hasan, Derdy Sugono. 2000. Telaah Bahasa dan Sastra. Jakarta: Pusat Bahasa dan Yayasan Obor Indonesia.
- 2000. Politik Bahasa, Risalah Seminar Politik Bahasa. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Ismail, Siti Zainon. 2001. Jurai Palma. Kumpulan Cerpen (1990-1999). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Moeliono, Anton M. 1989. Kembara Bahasa, Kumpulan Karangan Tersebar. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia.
- Rusmini, Oka. 2000. Tarian Bumi. Magelang: Penerbit Indonesia Tera.
- Sihombing, Liberty P., Multarnia R.M.T. Lauder, L. Pamela Kawira, dan Nitrasatri Handayani. 1994. Bahasawan Cendekia, Seuntai Karangan untuk Anton M. Moediono. Jakarta: Penerbit PT, Intermedia.
- Sugono, Dendy. Peningkatan Daya Upaya Bahasa Indonesia dalam Menyongsong Era Globalisasi.

**KOSAKATA BAHASA INDONESIA  
SEPANJANG MASA**  
**Ayatrohaedi**  
**Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI**

**1. Pamuka**

Baik sebagai bahasa kebangsaan maupun sebagai bahasa negara, umur bahasa Indonesia masih sangat pendek. Dihitung dari sejak diikrarkannya istilah bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda yang kedua tanggal 28 Oktober 1928, umurnya baru 75 tahun, atau tiga generasi. Namun sebagai basantara yang pernah menyangang nama lain sebelum bahasa Indonesia, umurnya pastilah sudah sangat tua.

Dari riwayatnya yang panjang itu, peranannya sebagai basantara itulah yang paling menonjol hingga saat ini. Melalui jejaknya berupa tinggalan dalam berbagai bentuk dan wujud itu, dapat dilacak bagaimana perkembangan basantara itu sejak masa yang paling awal hingga detik ini. Secara garis besar, riwayatnya dapat dibagi ke dalam dua babak yang masa keberlangsungannya tidak sama. Babak yang pertama adalah babak basantara itu dikenal sebabai *bahasa Melayu*; babak berikutnya adalah babak *bahasa Indonesia*.

**2. Babak Bahasa Melayu**

Selama babak bahasa Melayu, peranan yang paling menonjol dan besar dari basantara itu adalah peran sebagai basantara. Menurut hasil kajian para ahli bahasa, terutama yang menggeluti linguistik histories komparataif, diduga bahasa itu digunakan di suatu bentangan wilayah yang sangat luas. Bahasa-bahasa yang digunakan dari Madagaskar dan pulau-pulau sekitarnya di sebelah barat hingga kepulauan Paskah di ujung timur; serta dari kepulauan Formosa di sebelah utara hingga pulau Rote dan Sumba di sebelah selatan, dianggap sebagai wilayah pakai basantara yang pernah dinamakan bahasa Melayu-Polinesia dan kemudian lebih sering disebut bahasa

Austronesia itu. Bahkan para peneliti dan ahli bahasa itu sampai pada simpulan bahwa pada masa sebelum bersentuh budaya dengan kebudayaan di luar wilayah itu, penduduk Austronesia di masa lampau menampilkan ciri-ciri yang sangat khas. Ada lima ciri yang membedakan penduduk Austronesia dari penduduk pendukung kebudayaan yang lain, yaitu (1) mereka hidup berdekatan dengan air (danau, sungai, laut), (2) alat transportasi utama mereka adalah perahu (sampan, rakit, getek), (3) mereka berdiam di rumah panggung, (4) makanan utama mereka umbi-umbian, dan (5) mereka sudah mengenal "tulisan". Contoh kesamaan kosakata yang berasal dari masa "Nusantara" itu di antaranya adalah lima atau yang berdekatan dengan itu, dengan makna 'lima', dan langit atau yang berdekatan dengan itu, dengan makna 'langit'. Belum lagi kata-kata untuk 'abu', dari abu, awu, hawu, afu, habu, hingga wahu.

Setelah dunia mulai "terbuka" terjadilah sentuh budaya kebudayaan "Nusantara" itu dengan berbagai kebudayaan lain. Sentuh budaya yang paling menentukan sehingga mulai terjadi perubahan dan penambahan kosakata itu, antara lain dengan kebudayaan India, Cina, Parsi, dan Arab. Selain dengan keempat kebudayaan besar itu, juga terjadi sentuh budaya dengan kebudayaan yang pada masanya tidak terlalu penting. Melalui sentuh budaya itu, selain terjadi pengayaan kosakata, juga terjadi kebebasan memilih kosakata yang dirasakan sangat diperlukan. Penyerapan itu biasanya terjadi karena (a) kosakata baru itu diperlukan karena tidak ada kata yang memadai untuk mendukung rucita 'konsep' yang dikandungnya; (b) dianggap lebih "tinggi" nilainya, atau (c) merupakan kosakata yang khas dalam suatu bidang kehidupan tertentu.

Dalam bidang keagamaan, misalnya, 'kekuatan lebih' yang dalam sejumlah bahasa Austronesia muncul dalam kata hyang, hiang, dangiang, rahiang, dan danyang, misalnya, digantikan oleh dewa, dewata, dewi, batara, batari, lokapala, dan jagatnata. Ketika pengaruh Arab masuk, rucita tentang 'keluataan lebih' itu menjelma ke dalam Allah, ilahi, Gusti Allah. Pangeran yang makna asalnya adalah 'tempat berlindung, tempat berdiam' pun, kemudian ada

yang hanya digunakan untuk Allah, misalnya kata Pangeran dalam bahasa Sunda. Namun, seperti halnya dalam bahasa Jawa, bahasa Sunda pun masih mengenal pangeran yang "asli" itu, misalnya Pangeran Diponegoro, Pangeran Kornel, Gusti Pangeran Haryo (GPH).

Mengingat pada kurun itu juga terjadi sentuh budaya dengan Cina yang dibuktikan antara lain oleh tinggalan benda-benda budaya Cina berupa keramik, mata uang, dan nisan beraksara Cina, sangat diharapkan kosakata Cina juga terserap ke dalam berbagai bahasa Nusantara, Mungkin katajung 'perahu' dan cina 'cina' berasal dari masa itu. Kata cina, misalnya, antara lain ditemukan dalam naskah Sunda Buhun *Sanghyang Siksa: Kanda ng Karesyan* (1518). Di awal abad XVI itu, bangsa dan budaya yang dianggap patut diteladani oleh orang Sunda adalah Jawa dan Cina sehingga sama sekali tidak mengesankan sesuatu yang negatif berkenaan dengan keduanya.

Berdasarkan data tulis yang ada dapat diketahui bahwa selama kurun waktu sedikitnya 15 abad itu sentuh budaya yang paling seksama terjadi dengan India. Sudah sejak prasasti berbahasa Melayu yang paling awal dari Sriwijaya, kosakata Sansekerta yang muncul pada prasasti-prasasti itu sekitar 30 persen dari kosakata yang digunakan. Jumlah itu menyusut sejalan dengan mulai terjadinya sentuh budaya dengan budaya dan agama Islam yang menggunakan bahasa Arab. Bahkan, hampir semua naskah berbahasa Melayu sejak Sajak Melayu, misalnya, serapan kosakata Arab dapat dikatakakan mewisesa (mendominasi) bahasa Melayu. Naskah-naskah Melayu itu dari judulnya saja jelas sekali menunjukkan dari mana pengaruh itu berasal: Sejarah Melayu, Hikayat Banjar, dan Syair Singapura Dimakan Api, hanyalah sekadar contoh.

Ketika sejak abad XVI terjadi persaingan di antara bangsa-bangsa Eropa untuk mencari dan menguasai lajur niaga rempah-rempah, terjadi sentuh budaya antara Nusantara dengan Eropa, diawali dengan Portugis, lalu kemudian dengan Spanyol, Belanda, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, dan bahkan Rusia. Karena kemudian

Nusantara berada di bawah kekuasaan Belanda, baik melalui VOC maupun pemerintahan Hindia Belanda, sangat wajar jika kosakata yang paling banyak diserap dari bahasa Belanda.

Jika dibuat semacam "klasifikasi" bidang pengaruh bahasa-bahasa asing itu akan terlihat bahwa pengaruh itu ada yang (1) tumpang tindih di bidang yang sama, (2) pengaruh yang datang kemudian menggantikan yang sebelumnya, dan (3) mengisi kekosongan di bidang yang berbeda.

### **3. Babak Bahasa Indonesia**

Secara resmi, babak bahasa Indonesia bermula dari ikrar para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Namun karena bahasa sebagai unsur budaya, tidak serta merta berarti bahwa bahasa Melayu yang merupakan leluhurnya langsung mati. Kedua bahasa itu masih tetap berkembang dan memiliki pendukungnya masing-masing. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu di Indonesia kemudian "turun" menjadi bahasa daerah, sementara di Malaysia justru menjadi bahasa kebangsaan dengan penyesuaian nama sesuai dengan nama negaranya, bahasa Malaysia. Di Singapura, dan Brunei Darussalam tetap bernama bahasa Melayu, seperti juga halnya dengan di Patani (Thailand Selatan).

Sebagai bahasa yang "baru lahir", bahasa Indonesia ternyata dapat dibandingkan dengan bayi yang bongsor dan sangat rakus. Cepat besar dan berkembang, dan melahap serapan dari bahasa apa saja, sering kali tanpa kendali. Akibatnya, dalam bahasa Indonesia sekarang ini banyak sekali kosakata yang sebenarnya berasal dari bahasa asing dan bahasa daerah. Para penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya, dengan bangga menyatakan bahwa kamus itu merupakan kamus bahasa Indonesia yang terlengkap saat ini. Dalam kamus yang memuat sekitar 10.000 jejar 'entri, lema, kata kepala' itu ("Kata Pengantar" Kepala Pusat Bahasa ketika itu, Lukman Ali, hanya menyebut angka 72.000, 10.000 di antaranya merupakan jejar baru; tidak pernah ada penjelasan lebih mutakhir mengenai penambahan jejar hingga mencapai 10.000 itu) nampaknya kosakata yang berasal dari bahasa asing kian

bertambah. Bahkan tidak pula mustahil penambahan sebanyak 50.000 kata itu (semula 62.000) hampir semuanya dari bahasa asing itu. Jika demikian, apakah tidak mungkin kamus itu kemudian dikatakan saja sebagai kamus bahasa asing dengan ejaan Indonesia, atau kamus pengindonesiaan kata asing?

Dalam menyerap kosakata asing itu, kebijaksanaan mutakhir Pusat Bahasa adalah menjadikan bahasa Inggris sebagai sumber acuan atau rujukan, baru bahasa yang lain. Namun ternyata, sering terjadi pemerkosaan kaidah bahasa Inggris itu. Kata Inggris *mass*, misalnya, diindonesikan menjadi *massa*, semata-mata karena ingin menghindari kerancuan dengan *masa* yang sudah lama digunakan. Pertanyaan yang muncul adalah, berdasarkan pola apa akhiran -a itu, sementara kata-kata *episoda*, *metoda*, dan *periode* yang pernah berkembang, dinyatakan "haram" dan harus menjadi *episode*, *metode*, dan *periode* (Belanda). Padahal, bahasa-bahasa Nusantara tidak mengenal bunyi lemah (a) pada suku akhir yang terbuka; yang ada adalah pada kata-kata Melayu *tiba* 'tiba' dan *bila* 'bila'. Padahal lagi, katanya sumber acuan bukan lagi bahasa Belanda. Karena merujuk kepada bahasa Inggris yang memang merupakan bahasa resmi di negaranya, bahasa Malaysia menyerap ketiga kata itu menjadi *episod*, *metod*, dan *period* yang jelas merujuk bahasa Inggris.

Dalam perkembangan terakhir, ada kecenderungan untuk memanfaatkan kata-kata yang sudah lama terlupakan (atau dilupakan). Kata-kata lama itu sebenarnya merupakan kosakata yang berasal, dari bahasa daerah atau bahasa asing Asia (terutama Sansekerta dan Arab). Kalangan kedokteran, misalnya, sudah lama memasyarakatkan istilah nabati dan hewani yang berasal dari Arab. Dari bahasa Arab itu, yang kemudian juga banyak dimanfaatkan adalah akhiran -i dengan varian -wi, -iah, atau -ni yang mungkin benar dan mungkin salah. Pemakaian akhiran itu rupanya tanpa lagi memerhatikan dari mana kata yang diimbuhi itu berasal. Maka, dari kata *surga* yang asalnya *swarga* dari bahasa Sansekerta, misalnya, muncul kata *surgawi* 'bersifat surga'. Demikian juga dengan akhiran -wan atau -man yang Sansekerta, juga dilarapkan

untuk kata apa saja sehingga muncul kamerawan juru kamera' atau bahkan teaterawan 'pemain atau ahli teater' yang sebenarnya Eropa. Cukup menarik karena untuk pancasila yang Sansekerta, kata yang muncul justru pancasilais, bukan pancasila yang sebenarnya lebih tepat dan tanpa pemerkosaan kaidah bahasa aslinya. Lalu, dari falsafat atau filsafat muncul falsafati 'bersifat filsafat', padahal kaidah bahasa Arab sebenarnya falsafi. Sejalan dengan itu, muncul juga akhirati untuk ukhrawi 'bersifat akhirat'.

Dalam upaya menghormat seseorang, bahasa Indonesia banyak menggunakan kata Jawa atau bahasa daerah lain. Seseorang yang sudah tua atau lanjut usia, misalnya, dihormat dengan menyebutkan sudah sepuh yang dirasakan lebih hormat daripada sudah tua. Orang-orang terhormat yang tua-tua pun dikelompokkan menjadi pinisepuh yang makna asalnya adalah 'yang dianggap (sudah) tua'.

Kadang-kadang pemanfaatan kata lama itu kurang tidak disertai pernahaman mengenai makna, kata itu dengan benar. Menyambut peringatan hari jadi RI yang ke-20 di tahun 1965, misalnya, pernah muncul ungkapan dwidasawarsa. Entah apa sebabnya, dalam pidato kenegaraannya ketika itu, Presiden Sukarno menyatakan bahwa kita mengalami set back 'langkah mundur' delapan tahun. Jika kita tahu bahwa dwidasawarsa memang bermakna 'duabelas tahun' dan bukan 'duapuluh tahun', pernyataan Presiden itu benar-benar kena: Negara, yang sudah berumur 20 tahun diperingati seolah-olah baru 12 tahun. Dalam bahasa Jawa Kuna, duapuluh adalah wingsati, bukan dwidasa. Kekeliruan jenis itu bertambah dengan mengatakan tridasawarsa untuk 'tigapuluh tahun' padahal maknanya 'tigabelas tahun' atau tri pancawasra sebagai pengganti lustrum ketiga yang katanya berarti 'limabelas tahun' padahal sebenarnya ada tiga (apa pun) yang berumur lima tahun. Lustrurn ketiga seharusnya tritiyapancawarsa.

Dalam pada itu, karena bermula dan bahasa Melayu, penutur bahasa Indonesia sekarang sudah banyak yang sadar untuk menghindarkan pemakaian kata butuh perlu' mengingat dalam bahasa Melayu kata itu memiliki makna yang khas. Namun, kesadaran itu baru untuk kata-kata Melayu. Sementara orang Jawa

tidak akan pernah bertempik sorak, penutur bahasa daerah lain akan tenang-tenang saja melisankannya. Atau, jika seorang perempuan Jawa dengan berapi-api mengatakan agar kita (maksudnya kaum perempuan) jangan takut momok, tentulah perempuan Sunda akan senyum dan kulum. Bukankah mereka tidak pernah meninggalkannya barang sejenak?

Perkembangan kosakata bahasa Indonesia seperti itu, jelas sekali antara lain karena tidak ada atau kurangnya rucita dari para pemikir bahasa Indonesia. Jika akhir-akhir ini untuk mudahnya muncul mol (dituliskan mal) untuk mall, atau resort untuk resort, kesan yang diperoleh adalah mau mudah saja. Mengapa bukan mola, mengingat kita pernah menyerap ball menjadi bola? Lalu, mengapa harus memaksakan ramp, padahal leluhur kita pernah mewariskan lampu, buku, bangku, dan kartu untuk sejumlah kata bersuku satu dengan konsonan rangkap dalam bahasa aslinya (lamp, bank, card atau kaart) atau kata bersuku tunggal seperti book atau boek?

Jika melalui buku 'kitab' dan buku 'ujung ruas' yang kita warisi, penutur bahasa Indonesia tidak pernah tertukar memakai kedua kata itu, mengapa setelah kebutaaksaraan menurun, para ahli bahasa justru ketakutan penutur bahasa Indonesia tidak dapat membedakan masa 'waktu' dari masa 'khalayak' sehingga untuk yang kedua itu kita tegateganya memerkosakan kata Inggris itu menjadi massa? Mereka yang menggeluti bahasa Jawa Kuna atau Sansekerta, misainya, masih dapat menambahkan makna masa yang lain, yaitu 'perak'.

#### **4. Pamunah**

Nampaknya, semua itu memang terpulang kepada kita semua.

# **KEBIJAKAN BAHASA DAN DINAMIKA BAHASA-BAHASA DAERAH DI INDONESIA**

**I Dewa Putu Wijana**  
**Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada**

## **1. Pengantar**

Ada sejumlah faktor yang sangat besar peranannya di dalam menentukan kelangsungan hidup suatu bahasa. Satu di antaranya adalah kebijakan bahasa yang dligariskan oleh pemerintah yang dilaksananakn lewat lembaga yang paling berkompeten yang ditunjuk oleh pemerintah membina dan mengernbangkan bahasa atau bahasa-bahasa yang ada di suatu negara, sepeti Pusat Pernbinaan Bahasa di Indonesia. Sehubungan dengan ini petikan berikut ini agaknya merupakan bunyi garis kebijakan yang paling banyak dikutip oleh para ahli sebelum atau kalau berbicara mengenai kebijakan bahasa di Indonesia :

Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah lambang kebulatan semangat kebangsaan Indonesia, alat penyatuan berbagai-bagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang kebahasaan , kebudayaan, dan kesukuannya ke dalam satu masyarakat nasional Indonesia, alat perhubungan antar suku, antar daerah, dan serta antar budaya ... Di dalam kedudukannya, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi pemerintahan, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi." (Halim, 1980, 17).

Secara jujur dalam hal ini perlu kiranya diakui bahwa garis kebijakan ini memiliki nilai positif. Dengan adanya garis kebijakan inilah berjuta-juta rakyat Indonesia dari etnis yang sangat beragam-ragam sekarang ini memiliki bahasa persatuan, bahkan hanya bahasalah sekarang yang mungkin mempersatukan bangsa ini di tengah-tengah konflik etnik yang akan membawanya ke ambang kehancuran. Tidak dapat dibayangkan bagaimana keadaannya bila sekiranya bangsa ini menggunakan beberapa bahasa sebagai bahasa resmi. Hanya saja memang pelaksanaan garis kebijakan yang semata-mata menekankan pembinaan dan pengembangan bahasa nasional tanpa secara serius melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa-bahasa daerah akan lambat laun menyebabkan semakin melemahnya peranan bahasa daerah, dan pada akhirnya akan

membawa kepunahan bagi bahasa daerah itu. Hal ini secara tidak langsung merupakan perampasan hak hidup masyarakat pendukung bahasa-bahasa lokal bersangkutan 'yang pada hakikatnya tidak ada bedanya dengan perampasan hasil bumi dan tambang oleh pemerintah pusat tanpa menghiraukan kesejahteraan para pemilikinya yang ada di daerahdaerah. Indikasi bagi pemusnahan bahasa-bahasa daerah di dalam pengembangan bahasa nasional, tampak dari pendapat seorang penatar yang merupakan linguis yang cukup terkemuka di Indonesia (sampai saat ini) pada tahun 1984 sewaktu mengikuti penataran leksikografi di Wisma Arga Mulya, Tugu Bogor yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (sekarang Pusat Bahasa). Sang Penatar itu secara tegas mengatakan bahwa Indonesia tidak memiliki dana dan tenaga yang mencukupi untuk membina dan mengembangkan bahasa-bahasa daerah yang jumlahnya beratus-ratus. Beliau berpendapat bahwa bahasa-bahasa daerah yang penuturnya sedikit dibiarkan saja mati, dan kepada mereka itu diajarkan (dimodernisasi) dengan bahasa Indonesia. Membiarkan mereka hidup dengan bahasa daerahnya, menurut Beliau, sama saja dengan memelihara mereka dalam museum hidup. Sehubungan dengan keterbatasan tenaga dan dana di atas, di Indonesia cukup ada tiga atau empat bahasa saja, yakni bahasa-bahasa yang jumlah penuturnya terbesar, yakni bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, dan bahasa Sunda. Pandangan ini tidak bedanya dengan pandangan A.A. Fokker yang sangat tidak berkenan dengan adanya bahasa-bahasa lain yang mengganggu pertumbuhan bahasa Indonesia. Berikut ini kata Fokker yang dikutip oleh Kaswanti Purwo (2000, 17):

"Dialek-dialek kecil haruslah hilang: itulah hukum yang tak tergoyahkan. Biarpun dialek-dialek itu digunakan (...) membuka hati penduduk setempat, dan bahkan tetap dipakai sebagai bahasa kehidupan yang lebih akrab, namun sebagai penjunjung pikiran untuk masyarakat yang lebih luas dialek itu harus melangkah mundur terhadap yang lebih kuat dan lebih maju.

Pandangan di atas jelas-jelas bertentangan, dengan garis kebijakan Yang telah disusun dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa daerah berikut ini:

"Bahasa-bahasa daerah yang, masih dipakai sebagai alat perhubungan yang hidup dan dibina oleh masyarakat pemakainya, dihargai dan dipelihara oleh negara oleh karena bahasa-bahasa itu adalah bagian daripada kebudayaan yang hidup".

## 2. Diglosia dan Kebocoran Diglosia

Konsep perencanaan haluan bahasa yang digariskan di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar itu pada mulanya dimaksudkan untuk menciptakan situasi pemakaian bahasa yang bersifat diglosik, atau bahkan triglosik (dengan masuknya bahasa Inggris) dengan pembagian fungsi kemasyarakatan secara jelas, seperti apa yang telah dikonsepsikan oleh Ferguson (1971), seperti halnya yang tampak pada pemakaian bahasa-bahasa di Haiti (antara Kreol Haiti dan bahasa Perancis), di Swiss (antara bahasa Jerman Swiss dan bahasa Jerman standard), dan di Mesir antara bahasa Arab Klasik dan bahasa Arab sehari-hari). Situasi di Indonesia diharapkan terjadi fungsi yang saling isi mengisi antara bahasa Indonesia sebagai varian H (high) dan bahasa-bahasa daerah sebagai varian L (low), serta bahasa Inggris sebagai varian H dalam fungsi kemasyarakatan yang lain lagi, yakni pengalihan ilmu dan teknologi modern. Romaine (1988, 33) mendeskripsikan pembagian tugas varian H dan L itu di dalam berbagai situasi sebagai terlihat dalam bagan berikut ini:

Situasi	H	L
Khotbah di gereja dan masjid	+	
Berbicara pada pembantu dan pelayan		+
Surat Pribadi		+
Pidato di parlemen dan pidato resmi	+	
Kuliah	+	
Percakapan dengan keluarga, teman dan kolega		+
Siaran Berita	+	
Tajuk rencana dan berita surat kabar	+	
Kartun Politik		+
Puisi	+	
Kesusastraan rakyat		+

Uraian mengenai situasi diglosia di Indonesia dengan menggunakan sampel 13 bahasa sebenarnya telah dilakukan oleh Abdullah (ed.) (1999). Dalam buku ini secara jelas diuraikan perbedaan fungsi yang diemban oleh bahasa Indonesia dengan fungsi yang diemban oleh bahasa-bahasa daerah di Nusantara di dalam ranah keluarga, tempat umum, rapat resmi, sekolah, upacara, khotbah, perkawinan, dan kernetian. Dikatakan bahwa pembagian fungsi kemasyarakatan bahasa Indonesia dan daerah dapat dilihat dengan indikator kelas sosial, usia, pola perkawinan, lokasi pemakaian, situasi pemakaian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lebih banyak digunakan oleh orang-orang muda usia, sedangkan generasi tua memiliki kecenderungan yang lebih besar menggunakan bahasa daerah. Keluarga perkawinan campur memiliki kecenderungan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lebih banyak dipakai di kota-kota, sedangkan di desa cenderung mempertahankan pemakaian bahasa daerah. Komunikasi formal cenderung menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan bahasa daerah digunakan dalam situasi yang sebaliknya. Situasi yang digambarkan oleh Abdullah (1999) ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan situasi diglosia yang terjadi di berbagai tempat, misalnya saja dengan situasi yang terjadi di Paraguay yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai varian H dan Guarani sebagai varian L, seperti dilukiskan oleh Wardaugh (1986, 97) dalam kutipan berikut:

"Spanish is the language used on formal occasions; it is always used in government business, in conversation with stranger who are well dressed, with foreigner, and in most business transactions. People used Guarani, however, with friends, servants and strangers poorly dressed, in the confessional, when they tell jokes or make love, and on most casual occasions. Spanish is the preferred language of the cities, but Spanish is preferred in the countryside, and the lower classes almost always use it for Just every purpose in rural areas".

Diglosia adalah situasi pemakaian yang bahasa yang stabil karena setiap bahasa diberi keleluasaan untuk menjalankan fungsi kemasyarakatannya secara proporsional. Situasi kebahasaan ini dapat berlangsung sampai berabad-abad. orang-orang yang hidup di masyarakat diglosia biasanya tidak memandang diglosia sebagai suatu masalah. Untuk ini perlu pula diperhatikan pendapat Ferguson (1971) yang juga dikutip oleh Wijana (2001) berikut ini:

"Diglossia is a relatively stable language situation in which, in addition to the primary dialects of the language (which may include a standard or regional standards), there is a divergent, highly codified (often grammatically more complex) superposed variety, the vehicle of

large and respected body of written literature, either of an earlier period or in another speech community, which is learned largely by formal education and is used by any sector of the community for ordinary conversation"

Jadi, jelas dalam hal ini bukanlah garis kebijakan bahasa itu yang dipermasalahkan, tetapi implementasinya yang lebih berpihak pada peningkatan peranan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sedangkan pembinaan dan pengembangan bahasa-bahasa daerah belum atau bahkan tidak mendapatkan porsi yang memadai, dan terkesan dilakukan sambil lalu. Kaswanti Purwo (2000) mengkritik keadaan ini dengan menyerang garis kebijakan pemerintah yang bunyinya terkesan bahwa pembinaan bahasa daerah bukan untuk bahasa daerah itu sendiri, tetapi untuk pengembangan bahasa Indonesia :

"Pembinaan bahasa daerah perlu terus dilanjutkan dalam rangka mengembangkan serta memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khasanah kebudayaan nasional sebagai salah satu unsurjati diri dan kepribadian bangsa".

Seperti yang diisyaratkan oleh Wardaugh (1986, 90) bahwa keinginan yang besar untuk menciptakan bahasa persatuan merupakan salah satu faktor yang paling dominan peranannya di dalam melemahkan situasi diglossia. Keharusan yang semakin besar untuk mengokohkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi mengakibatkan bahasa-bahasa daerah mulai ditinggalkan oleh penutur-penuturnya untuk, beralih kepada bahasa-bahasa yang lebih dominan yang dipandang lebih, menjanjikan, dan memungkinkannya melakukan mobilitas vertikal. Fenomena mulai melemahnya peranan bahasa-bahasa daerah disinyalir oleh Abdullah (1999) dan Widjojo (2001) terlihat mulai awal tahun 1970-an sebagai awal mulainya rezim orde baru dengan doktrin-doktrinnya yang mengagung-agungkan persatuan, kesatuan, stabilitas, keseragaman, dsb. Sebagai akibatnya kebocoran diglossia (diglossia leakage) di sana-sini semakin lama semakin tidak terelakkan lagi, dan sejumlah bahasa daerah kian menuju ambang kepunahan jauh hari sebelum sempat dideskripsikan. Menurut de Cuellar (Ed.) 90 persen dari bahasa-bahasa yang digunakan di dunia saat ini akan mengalami kepunahan dalam abad mendatang karena ketidakmampuannya bersaing dengan bahasa-bahasa yang lebih besar. Perhatikan kutipan berikut ini:

"The world wide pressures to assimilate are also having a drastic effect on languages, of which between five and six thousand are spoken to day, each of them reflecting a unique view of the world, pattern of

thought of culture. But many of these are in danger of disappearing in the foreseeable future, have no more children who speak them, and are being given up for metropolitan languages where speakers are culturally aggressive and economically powerful. Many of the former are already moribund, and some experts suggest that perhaps 90 percent of the languages spoken today will become extinct in the next century."

### **3. Dominasi dan Subordinasi Bahasa**

Semua bahasa adalah sama dalam artian kesemuanya merupakan alat komunikasi bagi penutur-penuturnya, dan masing-masing merupakan representasi keunikan penutur-penuturnya di dalam mengungkapkan, pengalaman, dan memandang dunia di sekitarnya. Oleh karena itu, setiap bahasa sebenarnya berpotensi untuk menjadi bahasa dunia. Hanya saja, untuk yang terakhir ini sangat tergantung dan lingkungan sosial politik, atau lebih tepatnya pada relasi kekuasaan (power relations). Dalam hubungannya dengan kekuasaan bahasa atau kedaulatan bahasa (linguistic force) Mackey (1973) dalam teori geolinguistiknya mengungkapkan bahwa kekuatan bahasa dapat diukur dengan sejumlah indikator, diantaranya demografi, persebaran, ekonomi, ideologi, dan kultural. Indikator demografi berkaitan dengan besarnya jumlah penutur bahasa. Indikator ekonomi berkaitan dengan pendapatan, nasional kotor (GNP) suatu negara, indikator kultural berhubungan dengan peranan bahasa di dalam ini mewadahi suatu ideologi, seperti agama, politik, dan ajaran-ajaran tertentu. Indikator kultural berhubungan dengan peranan yang dimiliki oleh sebuah bahasa di dalam mewarnai kekayaan budaya suatu masyarakat. Dengan indikator-indikator ini maka kemudian menentukan dominasi bahasa Inggris atas bahasa-bahasa lain di dunia pada abad 19, bahkan sampai sekarang ini. Walaupun jumlah penduduk Republik Rakyat Cina terbesar saat ini, tetapi indikator persebaran dan mobilitas penutur bahasa Inggris jauh lebih besar dibandingkan dengan bahasa Cina. Mackey mengungkapkan bahwa perpindahan penutur-penutur bahasa Inggris, terutama orang Amerika terjadi sejak berakhirnya Perang Dunia-11. Diperkirakan 40 juta orang Amerika mengubah alamatnya sekali dalam setahun, dan rata-rata seluruh penduduk Amerika berpindah 14 kali sepanjang hidupnya. Di berbagai kota hampir sepertiga penduduknya berpindah setiap tahun. Lebih dari tiga juta orang Amerika bepergian ke Eropa pada tahun 1970. Sementara itu dari indikator ekonomi, walaupun total pendapatan orang Jepang melebihi penutur bahasa Inggris, tetapi pendapatan kotornya lebih rendah. Pendapatan

nasional kotor dalam hal ini berperan penting dalam meningkatkan prestise nasional.

Dengan sejumlah indikator diatas, tidak begitu sukar kiranya menentukan dominasi dan subordinasi antara bahasa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa-bahasa daerah di dalam situasi pemakaian bahasa di Indonesia. Bahasa Inggris memiliki dominasi yang paling tinggi karena semakin banyak saja orang mempelajari dan menguasai bahasa ini. Bahasa Indonesia mendominasi pemakaian bahasa-bahasa daerah karena indikator ideologis mengharuskan semua orang Indonesia menguasai bahasa nasional ini, dan semakin banyak saja generasi muda meninggalkan bahasa ibunya. Sementara itu, di antara bahasa-bahasa daerah yang beratus-ratus jumlahnya di Indonesia, dilihat dengan indikator Mackoy bahasa Jawa mendominasi bahasa-bahasa daerah yang lain. Persentase kosa kata bahasa Jawa yang disumbangkan ke dalam bahasa Indonesia paling tinggi dibandingkan dengan persentase kosa kata bahasa-bahasa daerah yang lain. Pada saat ini di dalam media cetak berbahasa Indonesia memungkinkan ditemui wacana bahasa Inggris, tetapi belum tentu sebaliknya. Di dalam media berbahasa Jawa besar kemungkinan ditemui wacana berbahasa Indonesia tidak pula sebaliknya. Keharusan untuk menguasai bahasa Indonesia, dan penggunaan bahasa-bahasa daerah cukup dipergunakan sebagai bahasa pengantar sampai tahun ketiga, serta rendahnya kedudukan mata pelajaran bahasa daerah di dalam sistem pengajaran bahasa Indonesia membawa dampak terbentuknya pola subtractive biligual di dalam masyarakat Indonesia, yakni penguasaan bahasa kedua (bahasa Indonesia) lambat laun menggantikan bahasa pertama (bahasa daerah). Di banyak tempat di kota-kota bahkan yang tidak memiliki bahasa daerah (seperti Riau, Jakarta, Medan, Ambon, dsb.) sudah sejak dini berlangsung tipe pendidikan yang bersifat monolingual. Keadaan ini tentu saja akan semakin mensubordinasi peranan bahasa daerah.

#### **4. Globalisasi Bahasa-bahasa Daerah**

Keseragaman memang merupakan sesuatu yang penting di dalam membangun kesatuan bangsa, tetapi adalah kekeliruan besar bila menganggapnya, sebagai alat yang efektif untuk memulangun bangsa atas dasar keberagaman etnik, seperti pandangan Smith yang dikutip oleh Khaidir Anwar (1980, 24) berikut ini :

"There is no doubt that linguistic homogeneity and distinctiveness is an invaluable vehicle and symbol of nationhood and nation formation; but it would be misleading to consider it either a sufficient or a necessary mark of the ethnic nation."

Hal ini mengisyaratkan bahwa negara harus dibangun berdasarkan atas pelbagai keragaman, termasuk di dalamnya keragaman ethnisk, bahasa, budaya, dsb. Tentu saja dengan tidak mengesampingkan nilai persatuan. Oleh karenanya, setiap usaha yang memaksakan keseragaman atas kebinekaan ini merupakan tanda-tanda awal karnatian (Cuellar, 1996, 72). Khusus di dalam hubungannya dengan keberagaman bahasa dikatakan bahwa kebinekaan bahasa (linguistic diversity) merupakan aset kemanusiaan yang tak ternilai harganya, dan hilangnya sebuah bahasa merupakan pemiskinan (impoverishment) akan sumber pengetahuan dan pikiran masyarakatnya. Sebagai contoh banyak tumbuhan obat-obatan hanya diketahui oleh masyarakat di dalam kebudayaan tradisionalnya. Dengan hilangnya bahasa dan kebudayaan mereka, pengetahuan tentang khasiat penyembuhannya juga, hilang kecuali linguis, dan orang-orang yang berminat sebelunya telah mencatat nama-nama tumbuhan itu bersama khasiatnya secara baik. Misalnya khasiat obat kina telah diketahui oleh orang-orang di Amerika Selatan jauh hari sebelum datangnya orang-orang Eropa. Di Australia Utara akhir-akhir ini penyakit kulit, seperti borok-borok yang telah parah yang tidak dapat lagi diobati dengan obat-obatan medis ternyata dapat disembuhkan dengan mudah dengan cairan yang didapat dari tumbuh-tumbuhan yang telah dikenal namanya oleh orang-orang Aborigin. Sukses ini kemudian membuka penelitian-penelitian terhadap berbagai tumbuhan dengan bantuan orang Aborigin, lewat kata-kata bahasa mereka. yang sekarang ini diawatirkan akan punah. Khasiat buah mengkudu (Jw. Pace) sebagai obat berbagai macam penyakit sebenarnya jauh-jauh hari sudah diketahui oleh nenek moyang orang Jawa yang sering kali menganjurkan anak cucunya untuk mengalungkannya sewaktu terserang sakit gondong. Mangkin pula nanti orang-orang Jawa baru berhenti tertawa sinis kepada para leluhurnya apabila peneliti-peneliti Barat menemukan berbagai khasiat bunga Japlap yang sering digunakan oleh orang-orang desa mengobati anak-anak yang lambat berbicara. Selain itu, bersamaan dengan hilangnya bahasa-bahasa daerah, kearifan lokal atau kearifan tradisional yang tersimpan di dalam tradisi lisan, yakni tradisi yang disampaikan secara turun temurun dari mulut ke mulut, seperti legenda, peribahasa, mantera, tahayul, etimologi rakyat, dan sebagainya juga

tidak dapat diselamatkan (Sutarto, 2001, 65-66). Padahal, didalam masyarakat tradisional, sastra lisan itu berfungsi sebagai alat pengesahan pranatapanata dan lembaga kebudayaan, serta alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat itu selalu dipatuhi oleh anggota-anggota kolektifnya (Danandjaja, 1982, 19)

Dari kepentingan teori linguistik sendiri hilangnya bahasa-bahasa daerah juga merupakan kerugian yang sangat besar mengingat bahasa-bahasa itu seringkali menyimpan kekhasan-kekhasan yang sangat penting artinya bagi pengembangan teori-teori bahasa. Seperti halnya kekhasan yang ditunjukkan oleh bahasa Yaghan bahasa orang Indian di Tierra del Fuego yang memiliki verba yang mampu mengungkapkan setiap gerakan otot, gerakan manusia, dan perubahan alam. Bahasa Aceh adalah bahasa yang dikabarkan mampu menumbangkan salah satu kaidah universal tata bahasa relasional (Kaswanti Purwo, 2000, 4), padahal bila dilihat dari kasus persesuaian antara subjek dan verbalnya kasus seperti bahasa Aceh ini banyak ditemui pada bahasa-bahasa di Irian Jaya (sekarang Papua) atau bahasa Lamaholot di Flores (Fernandez, 1996, 41). Dilihat dari proses morfologinya, morfem-morfem dasar bahasa Jawa mungkin juga menyimpan berbagai keunikan yang belum banyak disingkapkan oleh para linguis. Morfem-morfem dasar leksem tertentu dalam bahasa Jawa wajib disingkat bila telah diberi afiks, dan tidak dapat diungkapkan secara lengkap. Orang-orang bukan penutur asli sering tidak dapat memahami mengapa kata ditokke 'dikeluarkan', ditengi 'dihamili', dijoke 'dimajukan', dsb. tidak pernah diungkapkan menjadi diwetoke, dimetengi, dan dimajoke. Fenomena ini paling tidak khas dalam bahasa-bahasa Nusantara. Bagi ahli-ahli pragmatik, bahkan usaha pendeskripsian bahasa saja belumlah cukup, tetapi juga harus disertai dengan penyelamatan penutur-penuturnya dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan mereka terus menggunakan bahasanya. Oleh karena itu, usaha pemusnahan bahasa (linguistic genocide atau finguicide) harus terus diperangi (periksa Mey, 1994, 12).

Mengaca dari fakta-fakta diatas maka bencana yang berupa kepunahan beratus-ratus bahasa Nusantara harus dihindari dengan berbagai upaya, seperti pemberian keleluasaan bagi golongan minoritas untuk menggunakan dan mengembangkan bahasanya, dan yang tak kalah pentingnya tentu komitmen pemerintah yang lebih bersungguh-sungguh untuk membina dan mengembangkan bahasa-bahasa daerah itu. Bila bahasa yang kecil saja, tidak dapat dipunahkan, lebih-lebih bahasa yang

besar seperti bahasa Jawa yang jumlah penuturnya paling besar di antara bahasa-bahasa daerah yang lain harus terus dibina dan dikembangkan karena sumbangannya yang sangat besar bagi perkembangan bahasa Indonesia. Paling tidak sampai tahun 1984 (mungkin juga sampai sekarang) bahasa Jawa menduduki peringkat pertama dalam menyumbangkan kosa kata bagi bahasa Indonesia diikuti oleh dialek Jakarta, bahasa Minang, dan Sunda (selengkapnya lihat lampiran) (Masinambow dan Haenen, 2002, 36). Sumbangan itu tentu akan lebih besar lagi bila perkembangan kebudayaan Jawa (kesenian, kerajinan, pengobatan tradisional, dsb.) mencapai kemajuan-kemajuan yang cukup berarti. Berbagai aktivitas kehidupan sepertinya tidak dapat dilepaskan dari pemakaian bahasa Jawa. Hubungan mesra dan saling menguntungkan antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia tampak dengan jelas dalam wacana kartun yang menjadi objek kajian tulisan-tulisan saya beberapa tahun yang silam. Perhatikan misalnya wacana (1) s.d. (5) berikut ini:

- (1) Ahli ginjal-ginjal. Ahli ginjal.
- (2) Irama Melayu. Melayu ngalor, melayu ngidul golek utangan. (3) Jalan layang.
- (4) Cerita Anak-anak kancil nyolong uang proyek. (5) TPI. Teve Paling Isuk.

Pengaruh bahasa-bahasa besar termasuk bahasa Jawa, dalam konteks Indonesia, sebaliknya akan mengancam keberadaan bahasa lain, bahkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bila tidak ada kesadaraan, solidaritas, dan komitmen penuturnya untuk menjaga fungsi dan peranan yang dimainkan oleh bahasa nasional dan bahasa-bahasa daerah yang lain. Penutur-penutur bahasa Jawa, misalnya hendaknya bersikap cukup toleran dengan tidak semena-mena memasukkan kata-kata bahasa Jawa bila dipandang tidak perlu, misalnya dengan menggunakan kata *dahar*, *tapak astha*, *kondhur*, *tindhak*, dsb. bila dalam bahasa Indonesia sudah ada kata *makan*, *tanda tangan*, *pulang*, *berangkat* (*pergi*), dsb., serta tidak perlu ewuh pakewuh walaupun orang yang diajak berbicara orang yang sangat perlu dihormati. Sebaliknya orang-orang Jawa yang berkedudukan tidak perlu merasa terhina dan sakit hati bila bawahannya menggunakan kata-kata bahasa Indonesia itu.

## 5. Catatan Penutup

Program otonomi yang dicanangkan di berbagai daerah sebagai wujud pelaksanaan sistem desentralisasi pada masa reformasi sekarang ini membuka kesempatan yang cukup luas bagi pemerintah melaksanakan program-program pemerintahannya, termasuk pula keleluasan mengembangkan potensi budaya daerahnya. Satu di antaranya adalah keleluasaan di dalam mengembangkan program pengembangan bahasa daerahnya. Di masa-masa mendatang program pengajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah tidak hanya sebatas memfungsikan bahasa daerah sebagai bahasa perantara lalu digantikan dengan bahasa Indonesia (*subtractive bilingua*), tetapi harus mencanangkan pendidikan untuk mencetak anak didik yang di samping menguasai bahasa nasional juga mampu menggunakan bahasa ibunya dengan baik (*additive bilingual*). Pandangan-pandangan yang menganggap atau memandang pendidikan bilingual akan membawa efek-efek negatif kemampuan kognisi atau intelegensi anak didik, seperti yang dikemukakan oleh Jospersen, Hakuta, Goodenough, dan Smith tidak perlu terlalu dirisaukan karena penelitian-penelitian yang lebih kemudian yang dilakukan oleh Peal dan Lambert serta Skutnabb Kangas dan Touklomaa justru mengemukakan bukti-bukti yang sebaliknya (Roimaine, 1989, 99-109). Menurut Peal dan Lambert, anak-anak bilingual memiliki verbal dan nonverbal, yang lebih baik dibandingkan dengan rekan-rekannya yang monolingual. Sementara itu, Skutnabb- Kangas dan Toukomma dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pendidikan bilingual tidak membawa masalah sepanjang bahasa pertama ialah dikuasai secara baik. Sehubungan dengan ini Cuellar (1996) secara tegas mengungkapkan pendapatnya mengenai orang-orang bilingual atau multilingual yang lebih cara berpikir dan memiliki pola pikir yang lebih fleksibel. Karena telah konsep yang berbeda, dan bahkan konsep yang bertentangan, orang-orang bilingual lebih toleran daripada orang monolingual, dan lebih mampu memahami persoalan dari berbagai sudut pandang.

Pengembangan bahasa-bahasa daerah di negara multietnis guna percepatan saja harus pula memberikan dan kebebasan kesempatan bagi seluruh masyarakat mempelajari bahasa lain selain bahasa daerahnya. Untuk ini pengembangan wawasan linguistik yang dapat, mengikis sikap etnosentrisme yang memandang bahasa sendiri lebih unggul daripada bahasa yang lain akan menambah kenikmatan bukan penutur asli (*non-native speaker*) mempelajari bahasa-bahasa daerah sekalipun mereka

sudah berada pada usia krisis untuk memperoleh bahasa kedua. Walaupun tidak punya /t/ dan /d/ yang dental atau alveolar, bahasa Jawa tidak lebih unggul dari bahasa Bahasa Bali yang penuturnya mampu mengucapkan bunyi-bunyi hambat bersuara (voiced stops) di akhir kata layaknya orang-orang Banyumas yang secara linguistik terpinggirkan oleh orang-orang Solo dan Yogya. Bahasa Bali dan Bahasa Jawa yang di dalam aspek-aspek tertentu mungkin lebih unggul daripada bahasa Sunda, ternyata jauh lebih miskin dalam pernilikan diftong daripada bahasa Sunda Kuno yang diucapkan oleh orang-orang Badui.

### REFERENSI

Abdullah, Irwan (Ed.), 1999, *Bahasa Nusantara: Posisi dan Penggunaannya menjelang Abad Ke-21*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Anwar, Khaidir, 1980, *Indonesian: The Development and Use of A National Language*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Danandjaja, James, 1982, *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain*, Jakarta: Graffity Press, De Cuellar, Javier Perez (Ed.), 1996, *Our Creative Diversity*, Paris: Unesco Publishing.

Ferguson, Charles A., 1971, "Diglossia", dalam *Language Structure and Language Use*, Stanford University Press.

Fernandez, Inyo Yosef, 1996, "Persesuaian Subjek-Verb dalam Bahasa Mai Brat Dialek Ayamaru dan Lamaholot Dialek Ile Mandiri", dalam *Humaniora*, No III, Yogyakarta: Fakultas Sastra. Universitas Gadjah Mada.

Halim, Amran, 1980, *Politik Bahasa Nasional*, Jakarta: Balai Pustaka.

Kaswanti Purwo, Bambang, 2000, *Bangkitnya Kebhinekaan: Dunia - Linguistik dan Pendidikan*, Jakarta: Mega Media Abadi.

Mackey, William F., 1973, *Three Concepts of Geolinguistics*, Montreal: Recherche Internationale de Bilingualisme.

Masinambow, E.K.M. & Paul Haenen, 2002, *Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Mey, Jacob L., 1994, *Pragmatics: An Introduction*, Oxford: Basil Blackwell.

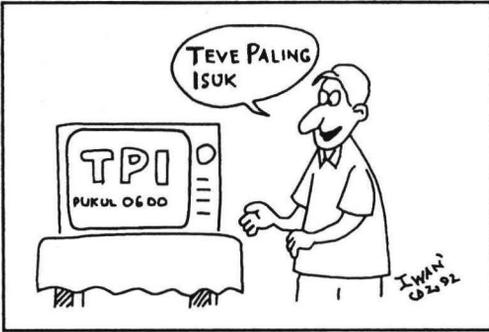
Romaine, Suzanne, 1989, *Bilingualism*, Oxford: Basil Blackwell.

Sutarto, 2001, *Di balik mitos Gunung Bromo: Tentang Orang Tengger dan Tradisinya*, Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Timur.

Wardhaugh, Ronald, 1986, *An Introduction to Sociolinguistics*, Oxford: Basil Blackwell.

Wijana, I Dewa Putu, 2001, "Bahasa Indonesia Orde Baru di antara Bahasa Daerah dan Bahasa Asing", dalam *Kebijakan Kebudayaan di Masa Orde Baru*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI.

Widjojo, Muridan S., 2001, "Pembakuan Petanda: Politik Semiotik Orde Baru", dalam *Kebijakan Kebudayaan di Masa Orde Baru*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat dan Kebudayaan-LIPI.



**Tabel 2.3 : Daftar kata bahasa non-Melayu dalam kamus Bahasa Indonesia**

BAHASA	1953	%	1966	%	1984	%
Sunda	63	2,29	98	2,50	102	4,38
Minang	780	28,35	1.487	37,88	181	7,77
Jakarta	957	34,79	1.261	32,13	873	37,50
Jawa	951	34,57	1.079	27,49	1.172	50,35
JUMLAH	2.751	100	3.925	100	2.328	100

**PROYEK PENGEMBANGAN KEBIJAKAN NILAI BUDAYA, SENI & FILM  
TAHUN 2003**